



www.kemhan.go.id

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

WiRA



PENERIMAAN SERTIFIKAT AKREDITASI
PARIPURNA RUMAH SAKIT DR. SUYOTO
DAN SYUKURAN HUT KE- 48
PUSREHAB KEMHAN

MENGENAL LEBIH DEKAT
UJI KOMPETENSI TEKNIS

QUO VADIS PEMBENTUKAN
PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS
NASIONAL (PPKN)

TRADISI UNIK DAN FILISOFINYA
DALAM MEMPERINGATI HUT RI

PROFIL BADAN SARANA
PERTAHANAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN

ISSN 1693-0231



MENHAN RI BESERTA KELUARGA BESAR KEMENTERIAN PERTAHANAN



mengucapkan :

DIRGAHAYU RI KE-71

Serambi Redaksi

Para pembaca yang budiman,

Kami kembali menyapa para pembaca dengan WIRA terbaru edisi Juli-Agustus 2016, edisi yang bertepatan dengan HUT Kemerdekaan RI ke-71. Dalam edisi ini, tim redaksi menyajikan beberapa tulisan diantaranya Mengenal lebih dekat uji kompetensi teknis, Penerimaan sertifikat akreditasi paripurna Rumah Sakit dr. Suyoto dan syukuran hut ke-48 Pusrehab Kemhan, Quo Vadis Pembentukan Pusat Penanggulangan Krisis Nasional (PPKN) dan tradisi unik dan filosofinya dalam memperingati HUT RI serta Profil Badan Sarana Pertahanan Kemhan. Tulisan-tulisan tersebut diharapkan dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan para pembaca sekalian.

Para Pembaca WIRA yang kami banggakan,

Untuk memperkaya artikel majalah WIRA ini, kami senantiasa mengharapkan partisipasi pembaca untuk mengirimkan tulisan, baik berupa artikel, opini, informasi, tanggapan ataupun kritik dan saran. Bagi yang ingin mendapatkan majalah WIRA bisa menghubungi tim redaksi kami melalui email redaksi.wira@kemhan.go.id. Majalah WIRA juga dapat diakses dalam jaringan online di laman www.kemhan.go.id.

Dirgahayu Ke-71 Kemerdekaan Indonesia, Jayalah Indonesiaku.

Daftar Isi

DEWAN REDAKSI

Pelindung/Penasehat:

Menteri Pertahanan RI
Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu

Sekjen Kemhan
Laksda TNI Widodo, M.Sc

Pemimpin Umum:

Kapuskom Publik Kemhan
Brigjen TNI Djundan Eko Bintoro, M.Si(Han)

Pemimpin Redaksi:

Kabid Kermainfo Puskompublik
Kolonel Inf. Drs. Silvester Albert Tumbol,
M.A.

Redaksi:

Letkol Arm. Joko Riyanto, S.Sos, M.Si.

Pns Mutiara Silaen, S.Kom, M.AP.

Desain Grafis:

Lettu Sus Farah Merila S, S.Kom.

Pns Imam Rosyadi

Foto:

Fotografer Puskom Publik Kemhan

Percetakan & Sirkulasi:

Pns Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

Diterbitkan oleh:
Puskom Publik Kemhan
Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta

MENGENAL LEBIH DEKAT UJI KOMPETENSI TEKNIS



Gambar 1.1 Lingkup Kompetensi

Kompetensi merupakan penggabungan antara pengetahuan, kemampuan dan sikap terhadap pekerjaan. Pengetahuan (knowledge) merupakan informasi yang terbentuk dari pemahaman dan potensi individu. Lebih lanjut kemampuan (skill) adalah kapasitas individu dalam melakukan beragam tugas pekerjaan.



PENERIMAAN SERTIFIKAT AKREDITASI PARIPURNA RUMAH SAKIT DR. SUYOTO DAN SYUKURAN HUT KE-48 PUSREHAB KEMHAN

Dengan terakreditasinya Rumah Sakit dr. Suyoto secara paripurna, diharapkan ke depan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya keluarga besar Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menyandarkan pelayanan kesehatannya. Di samping itu, tuntutan masyarakat luas terhadap Rumah Sakit yang terakreditasi paripurna tentunya memerlukan kemampuan sumber daya yang sesuai standar paripurna, sumber daya manusia yang mampu mengawaki, alat kesehatan serta sarana dan prasarana yang menunjang, sehingga terciptanya pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan.



QUO VADIS PEMBENTUKAN PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS NASIONAL (PPKN)

Selama ini persoalan dan penanganan krisis nasional yang bersifat multidimensional beserta manajemen penyelenggaranya belum terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik, hal ini dapat dibuktikan adanya beberapa keadaan darurat bagi warga negara di luar negeri dan krisis oleh adanya fakta kekuatan asing yang sengaja melanggar wilayah kedaulatan.



TRADISI UNIK DAN FILOSOFINYA DALAM MERAYAKAN PERINGATAN HUT RI

Ada yang berbeda dari rangkaian peringatan HUT ke-71 Kemerdekaan RI tahun ini, Presiden Joko Widodo menghadirkan pawai budaya lengkap dengan kereta kencana dan pasukan berkuda sambil mengarak Bendera Sang Saka Merah Putih.



PROFIL BADAN SARANA PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

Badan Sarana Pertahanan selanjutnya disebut Baranahan adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Badan Sarana Pertahanan dipimpin oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan disebut Kabaranahan. Badan Sarana Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana pertahanan.

MENGENAL LEBIH DEKAT UJI KOMPETENSI TEKNIS

Oleh:

Wina Christiana,S.E., M.AP

Assessor Muda Biro Kepegawaian Setjen Kemhan

PENDAHULUAN

"Untuk apa uji kompetensi teknis?" Pertanyaan tersebut mungkin ada pada sebagian besar pegawai yang mengikuti uji validitas soal dan uji kompetensi teknis di Kementerian Pertahanan. Beragam pemikiran pesimis akan hasil akhir uji kompetensi teknis pun bermunculan. Hal ini mungkin terjadi karena uji kompetensi teknis merupakan hal yang baru di Kementerian Pertahanan yang pasti mengandung pro dan kontra, ada yang optimis adapula yang pesimis akan hasil pelaksanaannya. Berikut kita ulas sedikit maksud dilakukannya uji kompetensi teknis yang merupakan salah satu bagian dari

lingkup manajemen sumber daya manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia nomor 41 tahun 2012 mengenai Jabfung Assessor SDM Aparatur dan Angka Kreditnya, Assessor diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi.

Demikian yang dilakukan Assessment Center dalam manajemen SDM di Kementerian Pertahanan, yaitu menjalankan fungsi dalam penilaian kompetensi pegawainya. Kompetensi merupakan penggabungan antara pengetahuan,



Gambar 1.1 Lingkup Kompetensi

kemampuan dan sikap terhadap pekerjaan. Pengetahuan (*knowledge*) merupakan informasi yang terbentuk dari pemahaman dan potensi individu. Lebih lanjut kemampuan (*skill*) adalah kapasitas individu dalam melakukan beragam tugas pekerjaan. Sedangkan sikap (*attitude*) merupakan kecenderungan untuk bertindak terhadap objek, orang atau peristiwa. Pengukuran dan penilaian yang dilakukan tidak hanya terbatas pada penilaian perilaku (kompetensi manajerial) namun juga pengukuran terhadap kemampuan bidang keilmuan (kompetensi teknis) pegawai.

KOMPETENSI MANAJERIAL DAN KOMPETENSI TEKNIS

Secara singkat kita ulas sedikit perbedaan kompetensi manajerial dan kompetensi teknis. Kompetensi manajerial merupakan kemampuan seseorang yang dinilai dari perilaku yang muncul, yakni perilaku kognitif (pemikiran) sebagai aspek intelektual, afektif terkait emosi dan motivasi dan psikomotorik terkait penilaian terhadap aktivitas gerakan motorik individu. Kompetensi manajerial digunakan untuk mengidentifikasi karakter individu yang sesuai dengan jabatan yang dituju serta mendeteksi kecenderungan potensi manajerial individu dalam sebuah jabatan (diluar kemampuan teknisnya). Sedangkan penilaian kompetensi teknis lebih pada penilaian kemampuan bidang keilmuan individu yang dipadankan dengan jabatannya saat ini.

Bila kompetensi manajerial berpedoman pada Kamus Kompetensi Perilaku, kompetensi teknis berpedoman pada Kamus Kompetensi Teknis yang diformulasikan oleh Assessor di Kementerian Pertahanan. Selama ini Assessment yang dilakukan cenderung pada penilaian kompetensi manajerial, yaitu kemampuan manajerial yang muncul dari perilaku seseorang pada saat observasi maupun simulasi di pelaksanaan Assessment Center. Mengingat pentingnya penilaian *skill* dan kemampuan di bidang keilmuan (kompetensi teknis) maka dibuatlah Kamus Kompetensi Teknis yang disusun sejak tahun 2013 melalui proses pengkajian bidang keilmuan yang bersinergi

dengan kemampuan teknis dalam susunan jabatan di Kementerian Pertahanan. Proses pembuatan Kamus Kompetensi Teknis sendiri dimulai pada bulan Maret hingga Agustus 2013. Penyempurnaan Kamus Kompetensi Teknis kembali dilakukan di tahun 2015 untuk mewadahi kompetensi yang diselaraskan dengan susunan jabatan yang bersifat dinamis di Kementerian Pertahanan.

Penilaian kompetensi teknis mengacu pada standar kompetensi yang dibuat, melalui standar kompetensi teknis diharapkan akan menjadi nilai tambah yang memperkaya lingkup penilaian Assessor terhadap kemampuan teknis assesee. Standar kompetensi tidak dapat dilakukan sekejap, diperlukan saran dan masukan untuk penyempurnaan standar ini. Pembuatan kamus kompetensi teknis dimulai dengan keterlibatan Assessor internal di lingkungan Kementerian Pertahanan beserta Konsultan dari luar Kementerian yang bertindak sebagai Ahli (*expert*). Kolaborasi kerjasama antara Assessor dan konsultan menghadirkan Kamus Kompetensi Teknis yang terformulasi dari berbagai bidang keilmuan yang lebih lanjut digunakan sebagai standar penilaian teknis pegawai di seluruh satuan kerja Kementerian.

Penilaian kompetensi sendiri merupakan proses membandingkan antara kompetensi yang dimiliki seseorang dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan melalui uji kompetensi teknis. Uji kompetensi teknis digunakan sebagai salah satu standar penilaian terhadap Assessee (pegawai yang akan diuji kompetensinya) yang dimulai dari jenjang eselon III dan eselon IV Kementerian Pertahanan. Beragam soal dari 14 (empat belas) *Job Family* di lingkungan Kementerian Pertahanan dibuat dengan mengacu pada Kamus Kompetensi Teknis. Kamus ini berisi informasi mengenai kompetensi bidang dan bersifat spesifik serta merujuk pada fungsi bidang tugas tertentu (bukan satuan kerja) dan kecenderungannya lebih kepada kompetensi berdasarkan karakteristik pengelompokan bidang keilmuan (*Job Family*).

Setiap *Job Family* memiliki pohon kompetensi

yang berbeda serta masing-masing kompetensi memiliki kompetensi akar, batang, dahan, ranting dan daun. Kompetensi Akar (*Core competency*) diantaranya :

- a) Manajemen Strategi Pertahanan,
- b) Manajemen Perencanaan dan Pembangunan Pertahanan,
- c) Potensi Pertahanan Negara,
- d) Manajemen Kekuatan Pertahanan,
- e) Manajemen Penelitian Pengembangan Pertahanan,
- f) Manajemen Sarana Pertahanan,
- g) Manajemen Sistem Informasi Pertahanan,
- h) Manajemen Keuangan Negara,
- i) Pengawasan dan Pemeriksaan,
- j) Manajemen Kesehatan Pertahanan dan Rehabilitasi,
- k) Hukum dan Legislasi,
- l) Pengembangan Organisasi dan Manajemen Kepegawaian,
- m) Pelayanan Umum dan,
- n) Komunikasi Publik .

KOMPETENSI TEKNIS TERDIRI DARI KOMPETENSI AKAR, BATANG, DAHAN DAN DAUN

Kompetensi level akar merupakan induk dari seluruh kompetensi yang ada di *Job Family*, salah satu contohnya adalah *Job Family* Manajemen Keuangan Negara. Kompetensi akar bersifat global, meliputi keseluruhan kompetensi yang ada dibawah kompetensi akar. Kompetensi level batang merupakan turunan dari kompetensi akar yang mewakili sebagian bidang kompetensi pada *Job Family* Manajemen

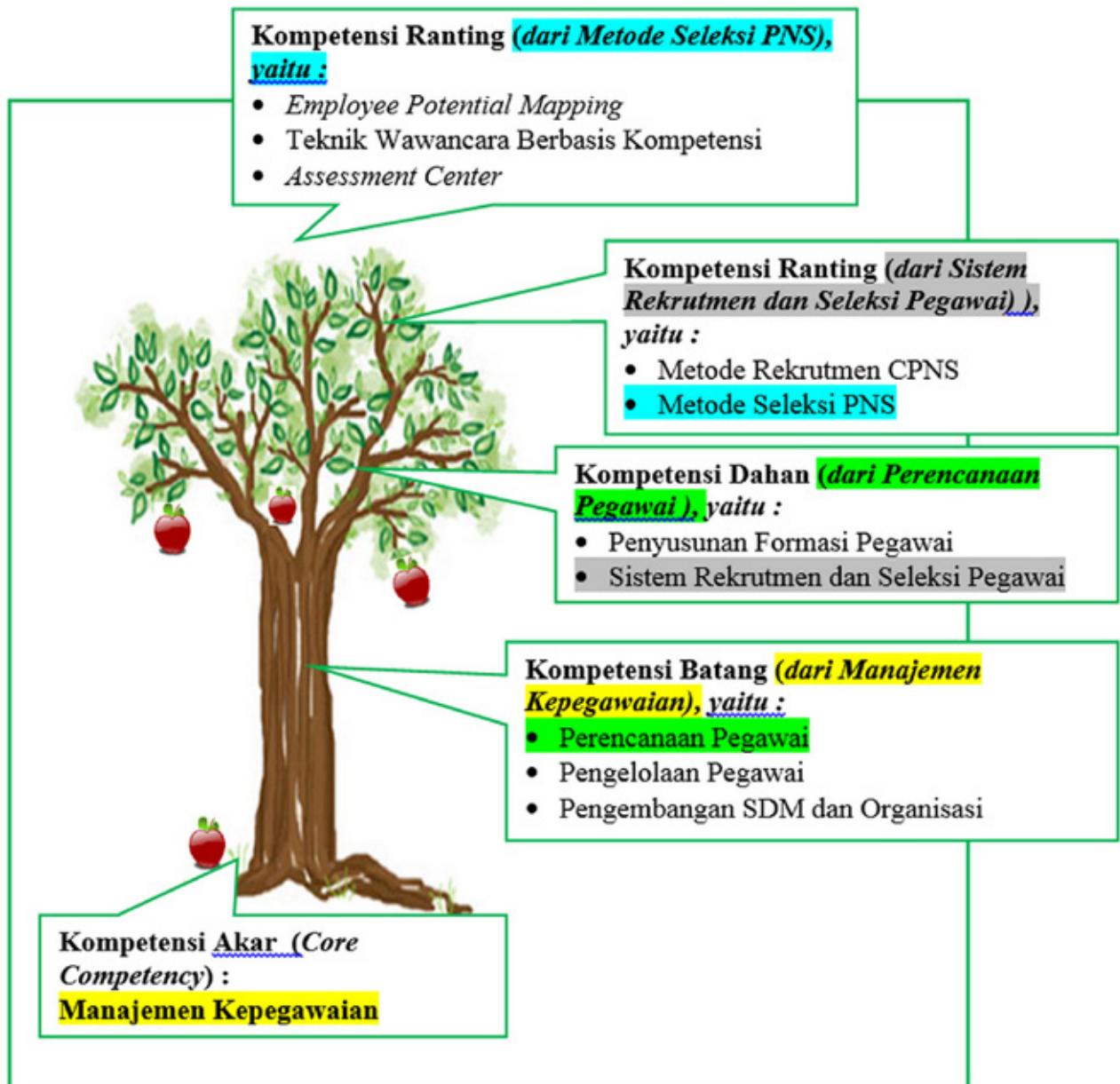
Keuangan Negara. Kompetensi batang bersifat *segmentatif-fungsional*, yang mewakili bidang-bidang pekerjaan tertentu dalam organisasi yang besar.

Kompetensi level dahan merupakan turunan dari kompetensi batang yang mewakili bidang-bidang kompetensi tertentu. Kompetensi dahan lebih bersifat spesifik yang merupakan rincian dari kompetensi batang. Lebih lanjut kompetensi level ranting merupakan turunan dari kompetensi dahan, bersifat lebih spesifik dari kompetensi dahan dan biasanya terkait dengan pengetahuan dan keterampilan tertentu dalam lingkup kompetensi dahan.

Sedangkan untuk Kompetensi level daun merupakan turunan dari kompetensi ranting. Kompetensi daun sangat spesifik terhadap suatu hal dimana faktor keterampilan lebih dominan dari faktor pengetahuan, dan sifatnya lebih sederhana. Tiap level kompetensi memiliki tingkatan yang berbeda. Kompetensi akar, batang, dahan, ranting dan daun terdiri dari beragam tingkatan dari level 1 (satu) sampai dengan level 4 (empat) terkait dengan tingkat kemahiran seseorang, yaitu :

- Level 1 merupakan tingkat kemahiran Awareness/Introductory/Basic Knowledge,
- Level 2 merupakan tingkat kemahiran Novice/Basic/Limited Experience,
- Level 3 merupakan tingkat kemahiran Intermediate/Practitioner/Applied,
- Level 4 merupakan tingkat kemahiran Master/Analyst/Advanced,
- Level merupakan tingkat kemahiran Expert/Specialist.

Kompetensi Teknis merupakan kompetensi yang dimiliki oleh cabang keilmuan dalam pelaksanaan tugas di satuan kerja (bukan merupakan kompetensi satuan kerja). Kompetensi Manajemen Keuangan Negara tidak mutlak milik satuan kerja Pusat Keuangan, Biro Perencanaan dan Direktorat Perencanaan



Pertahanan, namun terdapat pula pada semua pegawai yang bekerja di lingkup keilmuan manajemen keuangan negara, contohnya Kasubbag TU di seluruh satuan kerja Setjen Kemhan atau Bagian Program dan Anggaran di masing-masing Direktorat, dimana kompetensinya terdapat pada sub kompetensi Manajemen Keuangan Negara. Sama halnya dengan Kompetensi Hukum dan Legislasi tidak hanya terdapat pada satuan kerja Biro Hukum dan Direktorat Perundang-undangan namun juga terdapat di lingkup bidang Pengamanan, terkait dengan dahan kompetensi Hukum dan Legislasi, yaitu Pembinaan Hukum.

Pusat Rehabilitasi dan Direktorat Kesehatan masuk dalam kompetensi Manajemen Kesehatan Pertahanan dan Rehabilitasi dengan batang kompetensi yang berbeda sesuai bidang tugasnya masing-masing. Dari klasifikasi tersebut maka kebutuhan soal telah disesuaikan dengan bidang tugas teknis yang dihadapi individu pegawai dalam melaksanakan tugas di satuan kerjanya masing-masing.

Proses awal sebelum dilakukannya uji kompetensi teknis di Kementerian Pertahanan dimulai dari pembentukan Kamus Kompetensi Teknis dibuat Assessor bersama konsultan dengan mengklasifikasikan 14 (empat belas)

bidang keilmuan dalam bentuk pohon kompetensi. Masing-masing kompetensi terdiri dari kompetensi akar, batang, dahan, ranting dan daun. Lebih lanjut dari 14 (empat belas) *Job Family*, dibentuklah Profil Kompetensi Jabatan yang berisi Profil Kompetensi Teknis dan Profil Kompetensi Perilaku (manajerial) sesuai bidang jabatan masing-masing mulai dari Kepala Satuan Kerja eselon II, III dan IV di Kementerian Pertahanan. Setiap jabatan memiliki profil kompetensi manajerial dan profil kompetensi teknis yang berbeda sesuai dengan bidang tugas yang dikerjakan. Berdasarkan Kamus Kompetensi Teknis dan Profil Kompetensi Jabatan maka dibuatlah persoalan dalam bentuk pilihan ganda dan essay yang akan ditujukan pada masing-masing pejabat eselon II, III dan IV. Uji validitas soal dilakukan secara acak sebelum uji kompetensi teknis dimulai. Lembar persoalan terdiri dari materi bidang keilmuan sesuai *Job Family* yang telah valid dan selanjutnya materi persoalan tersebut diujikan kepada para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Kementerian Pertahanan. Setiap pejabat wajib mengerjakan bidang keilmuan sesuai penempatan jabatannya saat ini dan diperbolehkan memilih bidang keilmuan yang dikuasainya (diluar kompetensi teknis bidang keilmuannya).

UJI VALIDITAS DAN UJI KOMPETENSI TEKNIS

Uji validitas soal dilakukan secara sampling di lingkungan Kementerian Pertahanan melalui pertanyaan yang bersifat teknis sesuai bidang keilmuan individu. Uji kompetensi teknis kepada pejabat eselon III dan IV di semua satuan kerja yang berlangsung sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan 27 Mei 2016. Hasil penilaian kompetensi teknis pada akhirnya digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pengetahuan (bidang studi) individu yang kemudian akan dibandingkan dengan standar baku kompetensi teknis dalam jabatan. Penilaian dilakukan dalam bentuk % (*presentase*) penguasaan materi sesuai bidang keilmuan si individu. Selanjutnya Assessor melakukan rekapitulasi penilaian terhadap hasil uji kompetensi teknis pejabat eselon III dan IV, serta melakukan analisa dari berbagai sumber terhadap hasil akhir uji kompetensi teknis tiap individu yang akan dilaporkan kepada stakeholders di lingkup Kementerian Pertahanan.***



PENERIMAAN SERTIFIKAT AKREDITASI PARIPURNA Rumah Sakit dr. SUYOTO DAN SYUKURAN HUT KE- 48 PUSREHAB KEMHAN

Oleh :
Erlin Sudarwati, SKM., MM
Kasubbag Datin Bag TU Pusrehab Kemhan

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016, melakukan Kunjungan Kerja ke Pusrehab Kemhan. Dalam kegiatan Kunjungan Kerja Menhan ke Pusrehab tersebut, disertai oleh para pejabat eselon satu dan eselon dua di lingkungan Kemhan dan TNI dan di hadiri pejabat dari Kementerian Kesehatan, serta undangan lain.

Adapun rangkaian acara dalam kegiatan Kunjungan Kerja ini antara lain:

- a. Penerimaan Sertifikat Akreditasi Paripurna Rumah Sakit dr. Suyoto dari Ketua Eksekutif KARS (Komite Akreditasi Rumah Sakit) kepada Menteri Pertahanan.

- b. Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) Pusrehab Kemhan ke 48
- c. Peninjauan Pameran Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI di Pusrehab Kemhan.

AKREDITASI PARIPURNA Rumah Sakit dr. SUYOTO

Rumah Sakit dr. Suyoto Kementerian Pertahanan adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pertahanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan (Kapusrehab Kemhan). Rumah



Sakit dr. Suyoto mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medik, penunjang medik, dan rehabilitasi medik secara terpadu, serta penelitian dan pengembangan dengan kekhususan rehabilitasi medik komprehensif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Oleh karena itu, Rumah Sakit dr. Suyoto telah dilakukan penilaian akreditasi Rumah Sakit versi 2012 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Dalam Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Rumah Sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Badan yang berwenang melakukan akreditasi adalah Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yang bertugas mengawasi dan menetapkan mutu pelayanan Rumah Sakit.

Adapun pengertian dari Akreditasi Rumah Sakit adalah suatu pengakuan yang diberikan kepada Rumah Sakit oleh pemerintah melalui badan yang berwenang (KARS), karena Rumah Sakit telah memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian Rumah Sakit yang terakreditasi telah mendapat pengakuan dari pemerintah bahwa semua yang ada di dalam Rumah Sakit termasuk sarana, prasarana serta prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan standar yang berlaku.

Penilaian akreditasi didasarkan pada Standar Pelayanan berfokus kepada Pasien, Standar Manajemen Rumah Sakit, Keselamatan Pasien, dan Sasaran *Millennium Development Goals*. Standar pelayanan berfokus pada pasien terbagi menjadi tujuh bab, yaitu (1) Akses ke Pelayanan dan Kontinuitas pelayanan (APK); (2) Hak Pasien dan Keluarga (HPK); (3) Asesmen Pasien (AP); (4) Pelayanan Pasien (PP); (5) Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB); (6) Manajemen dan



Penggunaan Obat (MPO); dan (7) Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK).

Standar manajemen Rumah Sakit terbagi menjadi enam bab, yaitu (1) Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP); (2) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI); (3) Tata kelola, Kepemimpinan, dan Pengarahan (TKP); (4) Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK); (5) Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS); dan (6) Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI).

Sasaran keselamatan pasien Rumah Sakit terbagi menjadi enam sasaran, yaitu (1) sasaran ketepatan identifikasi pasien; (2) sasaran peningkatan komunikasi yang efektif; (3) peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai; (4) kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien operasi; (5) pengurangan resiko infeksi terkait pelayanan kesehatan; dan (6) pengurangan resiko pasien jatuh.

Sasaran millennium development goals terbagi menjadi tiga sasaran, yaitu (1) penurunan angka kematian bayi dan peningkatan kesehatan ibu; (2) penurunan angka kesakitan HIV/AIDS; dan (3) penurunan angka kesakitan Tuberkulosis.

Berdasarkan tingkat kelulusan adalah dasar, madya, utama dan paripurna. Paripurna merupakan tingkat kelulusan tertinggi yang



dapat diraih oleh Rumah Sakit. Rumah Sakit dengan tingkat paripurna menunjukkan telah lulus terhadap beberapa penilaian program kerja, diantaranya: akses dan kontinuitas pelayanan, manajemen pemberian obat, pendidikan pasien dan keluarga, dan keselamatan pasien.

Tujuan akreditasi diantaranya Rumah Sakit lebih menghormati hak-hak pasien dan melibatkannya dalam proses perawatan sebagai mitra. Selain itu dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat bahwa Rumah Sakit telah melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan berdasarkan keselamatan pasien. Rumah Sakit juga akan memiliki modal yang cukup untuk bernegosiasi dengan perusahaan asuransi kesehatan dan sumber pembayar lainnya dengan lengkapnya data tentang mutu pelayanan Rumah Sakit.

Rumah Sakit dr. Suyoto meraih predikat lulus dengan tingkat "paripurna" setelah dilakukan penilaian akreditasi Rumah Sakit versi 2012 oleh tim surveyor dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada tanggal 26 s.d 28 April 2016. Diraihnya akreditasi Rumah Sakit tingkat paripurna oleh Rumah Sakit dr. Suyoto telah dinantikan sejak lama yang membutuhkan dukungan, semangat dan komitmen yang luar biasa dari seluruh manajemen dan staf Rumah Sakit dr. Suyoto. Setelah melakukan persiapan selama kurang lebih 3 tahun semenjak diraihnya

akreditasi tingkat dasar pada tahun 2009. Rumah Sakit dr. Suyoto terus berbenah diri ditandai dengan pengembangan sarana dan prasarana, sumber daya manusia maupun perangkat kebijakan berupa regulasi yang dapat menjadi payung hukum yang merupakan turunan dari kebijakan nasional.

Dengan terakreditasinya Rumah Sakit dr. Suyoto secara paripurna, diharapkan ke depan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya keluarga besar Kementerian Pertahanan dan TNI untuk menyandarkan pelayanan kesehatannya. Di samping itu, tuntutan masyarakat luas terhadap Rumah Sakit yang terakreditasi paripurna tentunya memerlukan kemampuan sumber daya yang sesuai standar paripurna, sumber daya manusia yang mampu mengawaki, alat kesehatan serta sarana dan prasarana yang menunjang, sehingga terciptanya pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Akreditasi tingkat paripurna yang diperoleh Rumah Sakit dr. Suyoto diharapkan tidak selesai begitu saja, namun berkelanjutan dalam mengimplementasikan semua standar secara konsisten oleh segenap manajemen dan seluruh awak Rumah Sakit dr. Suyoto.

Pencapaian akreditasi tingkat paripurna bagi Rumah Sakit dr. Suyoto merupakan sebuah kebanggaan dan juga menuntut kewajiban bagi Rumah Sakit dr. Suyoto untuk dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanannya sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pasien yang berobat di Rumah Sakit dr. Suyoto. Penilaian terhadap komponen-komponen akreditasi masih dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya oleh Tim KARS, sehingga Rumah Sakit dr. Suyoto harus tetap senantiasa berkomitmen untuk menjalankan semua aspek pelayanannya sesuai dengan kebijakan-kebijakan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang telah dirancang demi peningkatan kualitas pelayanan.

Pemberian predikat lulus dengan tingkat

Paripurna Rumah Sakit dr. Suyoto ditandai dengan penyerahan Sertifikat Akreditasi Paripurna oleh Ketua Eksekutif Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS), DR. dr. Sutoto M.Kes kepada Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, yang selanjutnya diserahkan kepada Kapsusrehab Kemhan, Laksma TNI dr. Janti Undari, MKK, MSi (Han) serta penyematan PIN Akreditasi kepada Kepala Rumah Sakit (Karumkit) dr. Suyoto, Kolonel Kes dr. Budi Satriyo Utomo, SpKFR, MARS.

SYUKURAN HUT KE-48 PUSREHAB KEMHAN

Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan (Pusrehab Kemhan) adalah unsur pendukung pelaksana tugas dan fungsi pertahanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekjen. Pusrehab Kemhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian di bidang rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial dan perumahsakitan.

Sejarah berdirinya Pusrehab Kemhan diawali dengan sebuah keinginan untuk memberikan penghargaan kepada penyandang cacat ABRI/Veteran sekitar tahun 1960, beberapa tokoh Veteran membuat sebuah gagasan membangun suatu fasilitas rehabilitasi bagi penyandang cacat dalam bentuk Rumah Sakit Veteran. Pada tahun 1968 gagasan itu dihimpun dan dituangkan dalam bentuk naskah tertulis sebagai Naskah Proyek Rehabilitation Center (RC) ABRI/Veteran berupa rencana membangun R.C. ABRI/Veteran secara lengkap di Bintaro, Jakarta Selatan. Pada tahun yang sama dikeluarkan Surat Keputusan Menhankam/Pangab Nomor Kep/A/273/1968 tanggal 6 Juli 1968 tentang pelimpahan wewenang wadah penyelenggaraan rehabilitasi cacat bagi Penyandang Cacat Prajurit ABRI/Veteran tersebut dari Departemen Transmigrasi dan Veteran ke Departemen Pertahanan dan Keamanan (sekarang Kementerian Pertahanan). Sejak itulah secara resmi mulai diselenggarakan Proyek R.C. ABRI/Veteran yang merupakan



cikal bakal adanya Pusrehab seperti yang ada sekarang ini.

Pada tanggal 12 Juli 1979 sempat dijadikan sebagai hari jadi Pusrehabcat Dephankam. Akan tetapi guna meluruskan awal sebenarnya keberadaan Pusrehabcat Dephankam, maka atas persetujuan dari Sekjen Dephankam dengan Nomor Surat K/661/IX/1991 tanggal 11 Oktober 1991, dinyatakan bahwa pada tanggal 6 Juli 1968 ditetapkan sebagai Hari Jadi Pusrehabcat Dephankam.

Peringatan hari jadi atau Hari Ulang Tahun (HUT) Pusrehab, merupakan suatu momentum penting yang perlu untuk mengenang sejarah berdirinya Pusrehab Kemhan, dan merupakan waktu yang tepat untuk mengevaluasi tugas yang telah dilaksanakan dalam upaya mewujudkan penyandang cacat/disabilitas yang mandiri dan produktif.

Pada peringatan HUT ke-48 Pusrehab Kemhan yang jatuh pada tanggal 6 Juli 2016, telah dilakukan serangkaian kegiatan antara lain kegiatan bakti sosial, pertandingan olahraga, kegiatan ilmiah, ziarah, upacara, dan syukuran. Acara syukuran HUT ke-48 Pusrehab Kemhan dilangsungkan pada tanggal 24 Agustus 2016 bertepatan dengan Kunjungan Kerja Menhan dan penerimaan Sertifikat Akreditasi Paripurna Rumah Sakit dr Suyoto dari Ketua Eksekutif



KARS kepada Menhan yang selanjutnya diberikan kepada Kapusrehab Kemhan. Pada kesempatan Syukuran HUT ke-48 Pusrehab tersebut Menhan berkenan untuk memotong tumpeng yang diserahkan kepada Kapusrehab Kemhan.

Dalam kesempatan ini Menhan juga berkesempatan menemui para Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI yang sedang melaksanakan Rehabilitasi Terpadu di Pusrehab Kemhan.

PAMERAN REHABILITASI TERPADU

Pusrehab Kemhan menyelenggarakan Rehabilitasi Terpadu yang meliputi Rehabilitasi Medik, Rehabilitasi Vokasional, Rehabilitasi Sosial, dan Perumahsakitan. Rehabilitasi Terpadu bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, keterampilan, mental dan sosial agar Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI dapat lepas dari ketergantungan kepada orang lain, tumbuh percaya diri, dapat melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat sesuai kemampuan sehingga menjadi insan yang mandiri dan produktif.

Pada saat Kunjungan Kerja ke Pusrehab Kemhan, Menhan beserta rombongan berkesempatan untuk melihat Pameran Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas

personel Kemhan dan TNI. Pameran dari Bidang rehabilitasi Vokasional menampilkan hasil karya para penyandang disabilitas peserta Rehabilitasi Terpadu yang terdiri dai 15 jurusan keterampilan antara lain automekanik mobil, automekanik motor, operator komputer, teknik komputer, penjahitan, teknik pendingin, pertanian terpadu, musik, elektronika, design grafis, fotografi, las, *massage*, pertukangan kayu, dan tata boga.

Dari bidang Rehabiliatasi Medik, selain menampilkan Mobil Rehabmedik Keliling (Mobil Bengkel Otose Protese), Menhan berkesempatan memberikan alat bantu dan alat ganti tubuh (Ortose Protese) secara simbolis kepada Penyandang Disabilitas peserta Rehabilitasi Terpadu. Sebagai perwakilan penerima adalah Kopka Suwardi yang menerima Protese tangan (tangan palsu) dan Kopka Kabul Setya Budi menerima Kursi Roda Khusus.

Dari Bidang Rehabilitasi Sosial, ditampilkan para atlit Tenis Kursi Roda yang sedang berlatih di Lapangan Tenis. Di samping itu, dipamerkan beberapa foto kegiatan para atlit yang pernah menjuarai di tingkat nasional maupun internasional. Selain Tenis Kursi Roda, olah raga yang dikembangkan di Pusrehab untuk para atlit penyandang disabilitas adalah Menembak, dan Selam. Bidang Rehabilitasi Sosial juga menampilkan alat Tes Bakat Sidik Jari yaitu DMI (*Dermatoglyphics Multiple Intelligence*) yang digunakan sebagai salah satu sarana *assessment* bagi Penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI peserta Rehabilitasi Terpadu sebelum menentukan jurusan keterampilan yang akan diikuti.***

QUO VADIS PEMBENTUKAN PUSAT PENANGGULANGAN KRISIS NASIONAL (PPKN)

Oleh :

Kolonel Tek Dr. Sigit Priyono, GSC, S.IP, M.Sc

Kabid Politik dan Pertahanan ASEAN, Kemenko Polhukam



Sumber : maritim.go.id

PENDAHULUAN

Pemerintahan Republik Indonesia telah menerapkan sistem politik demokrasi dan menempatkan masyarakat sebagai bagian integral dalam sistem pembangunan dalam wilayah yurisdiksi nasional. Institusi pemerintahan merupakan komponen yang memiliki otoritas dan kewajiban untuk melindungi warga negara di samping menjaga kedaulatan negara, wilayah teritorial dan berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.

Bertumbuhnya bersama nasionalisme dalam taman internasional tidak terlepas dari ancaman multidimensional dalam eskalasi krisis dari lokal sampai dengan krisis nasional, sehingga lembaga negara semestinya menjamin terhindarnya krisis, baik mencakup aspek fisik maupun aspek psikologis. Pada tataran aspek fisik menjamin adanya kepastian (surety) dan keselamatan (safety) negara dan bangsa, sedangkan aspek psikologis, terjaminnya rasa aman (secure) seluruh warga masyarakat terhindar dari keadaan krisis multidimensional.

Selama ini persoalan dan penanganan krisis nasional yang bersifat multidimensional beserta manajemen penyelenggarannya belum terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik, hal ini dapat dibuktikan adanya beberapa keadaan darurat bagi warga negara di luar negeri diantaranya; pertama, evakuasi 1684 WNI terjebak konflik di Yaman pada bulan April 2015; kedua, kejadian pada bulan Mei 2015 Penyelamatan 26 WNI dari Nepal akibat gempa; ketiga, *Illegal Fishing* dan pelanggaran wilayah di Perairan Natuna dan yang sempat menjadi hot news ketika penanganan pembebasan sandera WNI di Filipina.

Penanganan krisis yang belum begitu terkoordinasi dan masih bersifat sektoral K/L menjadikan rebutan panggung politik nasional oleh berbagai aktor, antara lain : Aktor Birokrat K/L, Aktor partai politik, Aktor akademisi dan masyarakat lainnya, sehingga penanganan krisis nasional yang bersifat multidimensional seolah menjadi isu unik dan menjadi *trending topic* media.

Presiden memandang dan merasakan penting dan urgensinya penanganan krisis nasional sebagai fasilitas Presiden sekaligus sebagai barang publik untuk menjadi pertanggung jawaban pemegang otoritas politik terhadap kondisi dan situasi nasional akan krisis terhadap perlindungan dan keselamatan warga negara baik di dalam negeri, maupun diluar negeri. Terkait hal tersebut, Presiden telah memberikan perintah kepada Menko Polhukam pada tanggal 4 April 2016 tentang Pembentukan *Joint Task Force Command (JTFC)* di Mabes TNI dan *Crisis Center* di Kemenko Polhukam. Hal ini tentunya selaras dengan makna *crisis Center* sebagai; “*an office or agency that services as clearinghouse for information and coordinates action during an emergency or disaster*”. Pertanyaan dasar tulisan ini; Pertama, Bagaimana Kebijakan dan Krisis sebagai dasar perumusan kebijakan; kedua, Bagaimana Eskalasi dan Penetapan Krisis Nasional; Ketiga, Bagaimana Konsep Operasional PPKN/NCC; dan keempat Bagaimana merekonstruksi sebagai realisasi pembentukan NCC/PPKN.

QUO VADIS KEBIJAKAN DAN KRISIS

Krisis dalam bahasa China *Wei-ji* yang memiliki makna dua arti, "bahaya" & "peluang" atau *two side in the same coin*, sedangkan krisis yang berasal dari bahasa Yunani krisis, yang berarti "keputusan." Krisis menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBI) adalah Keadaan yang genting, kemelut, suram, saat yang menentukan ketika situasi menjadi berbahaya dan keputusan harus diambil. Kamus Militer dalam Anatomi Ketegangan dan Persengketaan adalah kelanjutan dari konflik dengan eskalasi yang semakin meningkat, keadaan menjadi tidak normal karena ketegangan yang sangat besar terjadi dengan bentrokan fisik yang mengancam stabilitas Nasional dan menjurus kepada keadaan bahaya. Steven Fink mengemukakan: “*a crisis is an unstable time or state of affairs in which a decisive change is impending - either one with the distinct possibility of a highly desirable and extremely positive outcome, or one with the distinct possibility of a highly undesirable outcome. It is usually a 50 - 50 proposition, but you can improve the odds*”. Kamus Besar Webster merumuskan manajemen krisis adalah “*a turning point for better or worse atau a decisive moment atau a crucial time*”. Disebutkan juga “*a situation that has reached a critical phase*”. Selanjutnya Steven Fink menyebutkan bahwa “*Crisis Management is the art of removing much of the risk and uncertainty to allow you to achieve more control over your own destiny*”. Sehingga esensi manajemen krisis adalah upaya untuk menekan faktor ketidakpastian dan faktor resiko hingga tingkat serendah mungkin, dengan demikian akan lebih mampu menampilkan sebanyak mungkin faktor kepastiannya. Kondisi ketidakpastian, resiko dan kepastian dibentuk dan dibedakan oleh masukan-masukan informatif tentang alternatif yang dapat digali dan ditempuh, tentang probabilitas berkait dengan masing-masing alternatif yang dapat ditempuh, dan akhirnya tentang perkiraan mengenai kejadianya sendiri.

Center adalah sebagai Pusat, Inti, Driven terhadap segala aktivitas yang melibatkan aktor negara dan Non-Aktor negara, Crisis Center: “*an office or agency that services as*

clearinghouse for information and coordinates action during an emergency or disaster", konsep National Crisis Center (NCC) menurut tim kecil adalah merupakan instrumen nasional dalam merumuskan dan pengambilan kebijakan nasional: diimplementasikan, dikendalikan dan dimonitor melalui kelengkapan media, ruangan, jaringan, teknologi dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dan Rapat Pimpinan Tinggi Menteri (RPTM) yang dipimpin oleh Menkopolhukam sebagai sarana bagi NCC dalam merumuskan Kebijakan Nasional.

Teori Kekuatan Nasional memberikan tawaran bahwa kekuatan politik negara adalah sarana untuk mencapai tujuan nasional dan kekuatan nasional adalah integrasi dari kekuatan ekonomi, politik, moral dan berbagai elemen kekuatan nasional lainnya. Adapun delapan elemen kekuatan nasional tersebut adalah Geography, Natural Resources (Food, Raw Materials), Industrial Capacity, Military Preparedness (Technology, Leadership, Quantity and Quality of Armed Forces), Population (Distribution, Trends), National Character, National Morale, Quality of Diplomacy dan Quality of Government (J. Morgenthau, 1947). Kekuatan nasional merupakan daya tangkal, daya survival, daya tumbuh dan kembang suatu bangsa yang sangat ditentukan oleh kondisi geografi dan kekayaan alam, karakter bangsa dan pemerintahannya. Di Indonesia konsep kekuatan nasional diterjemahkan menjadi ketahanan nasional (Tannas) yaitu kondisi keuletan dan ketangguhan bangsa, dalam konteks ini khususnya untuk membangun kualitas pemerintahan yang baik sebagaimana melaksanakan butir-butir reformasi birokrasi, khususnya dalam hal ini pembangunan sistem penanganan krisis nasonal bersifat multidimensional merupakan sebuah urgensi dan sangat penting dalam pelayanan publik dan pengendali terpusat untuk kepentingan dan perlindungan warga negara dalam krisis, sehingga mutlak adanya pembangunan NCC/PPKN.

Implementasi Kebijakan Publik PPKN/NCC, Secara umum tiga hal utama hambatan implementasi kebijakan publik adalah; pertama, merumuskan perencanaan yang hebat dan muluk-

muluk, akan tetapi sulit untuk melaksanakannya; kedua, penetapan kebijakan mengasumsikan kepada publik seolah pelaksana kebijakan sudah mengerti dan memahami, sehingga apabila tidak dilaksanakan, akan langsung mendapat hukuman; ketiga, implementasi kebijakan merupakan aktivitas auto pilot yang beranggapan kegiatan jalan dengan sendirinya.

QUO VADIS ESKALASI DAN PENETAPAN KRISIS NASIONAL

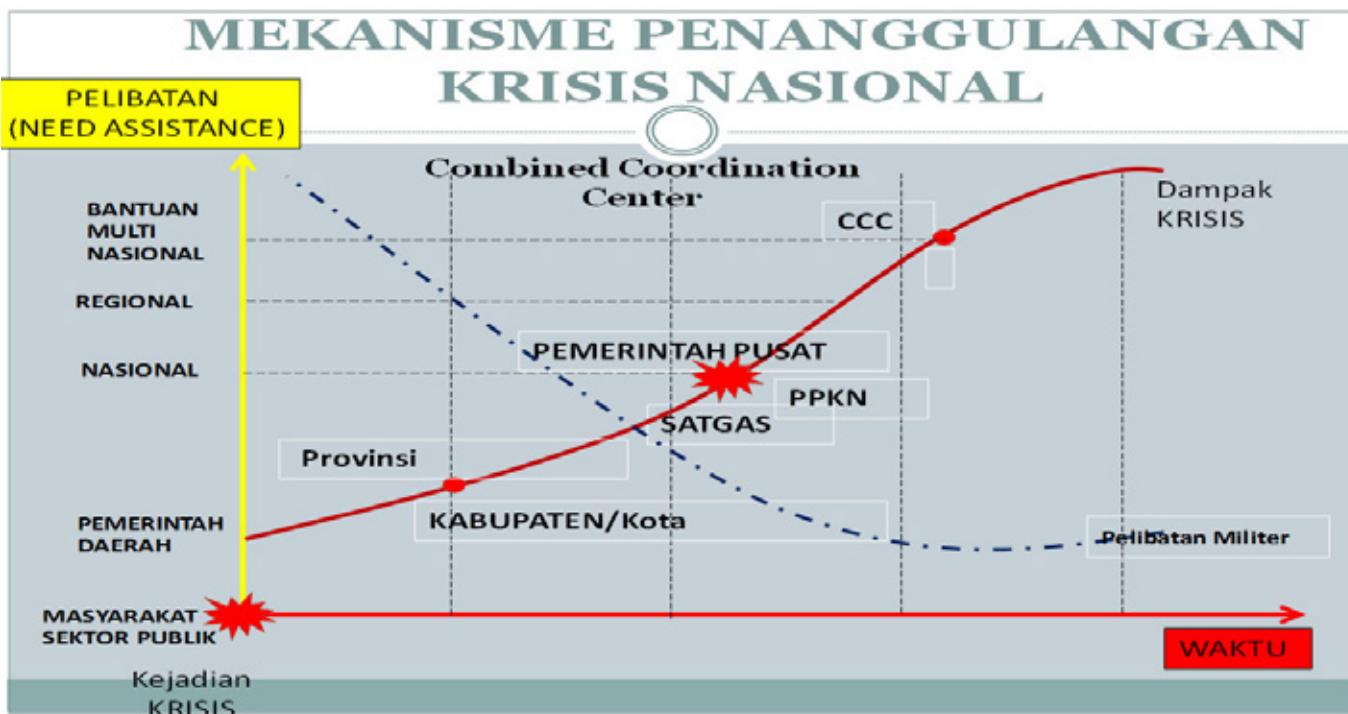
Penetapan Krisis Nasional tentunya ditetapkan oleh pemegang otoritas politik nasional dalam hal ini Presiden yang telah mendapat mandat dari rakyat (legitimasi) untuk bisa menilai atas pertimbangan K/L dan Pemda berupa rekomendasi yang telah melalui proses Rapat Pimpinan Tinggi Tingkat Menteri. Adapun Krisis Nasional ditetapkan dengan kriteria :

- a. Krisis menyangkut kepentingan nasional;
- b. Terhentinya fungsi pemerintahan daerah;
- c. Perlu penanganan secara terpadu dan komprehensif yang melibatkan berbagai stake holder/lintas kementerian dan lembaga; dan/atau
- d. Kriteria Krisis Nasional lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mekanisme pengelolaan seperti tersebut dapat dilihat pada gambar disamping.

KONSEP OPERASIONAL NCC/PPKN

Penyelenggaraan Operasional NCC/PPKN sebagai implementasi kebijakan diderivatifkan pada mekanisme informasi dari krisis Center K/L, Pemda dan lainnya dalam bentuk pelaporan, sehingga arus informasi yang dikelola secara bertingkat dan berlanjut untuk bisa mendapatkan keputusan pada levelnya, dalam hal ini terdapat dua hal utama sebagai proses yang signifikan yakni; pertama, apabila Input informasi didasarkan pada Eskalasi Krisis



dari informasi intelejen, Informasi Media DN/LN, Informasi Crisis Center (K/L dan Pemda), atau Informasi lainnya akan bersifat Linier via Rapat Pimpinan Tingkat Menteri (RPTM) dengan mekanisme penetapan krisis secara nasional oleh Presiden dalam penanganan krisis untuk menentukan unsur utama dan unsur pendukung melalui Proses perumusan Instruksi Presiden (Inpres).

Apabila Input informasi didasarkan pada Eskalasi Krisis dari informasi inteljen, informasi Media DN/LN, Informasi Crisis Center (K/L dan Pemda), atau Informasi lainnya akan bersifat Non Linier Process, Presiden dapat langsung memberikan perintah (*Direct order President*) ke K/L atau K/L membentuk Satuan Tugas yang bersifat dan situasi mendesak, yang selanjutnya akan dikontrol dan dikendalikan oleh NCC/PPKN sampai teratasinya krisis nasional tersebut, hal ini dapat dilihat pada gambar dihalaman berikutnya.

ALUR PENGELOLAAN INFORMASI KRISIS DI NCC/PPKN

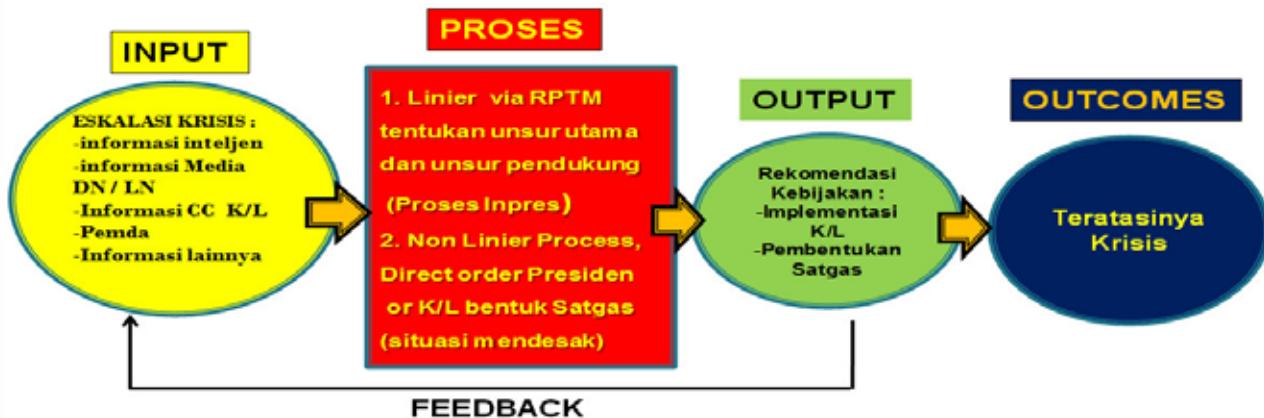
Output kegiatan CNN/PPKN dalam keadaan normal berupa Laporan yang dibuat PPK terdiri dari: pertama, laporan Informasi Singkat; kedua, Laporan Harian, Mingguan, Bulanan, Triwulan dan Tahunan; dan ketiga, Laporan Khusus/

Memo Khusus. Laporan Informasi Singkat adalah laporan cepat dan singkat dalam bentuk laporan informasi tidak tertulis maupun tertulis melalui Short Message System (SMS) atau sarana informasi Tekhnologi lainnya yang memuat minimal tentang hal-hal yang menyangkut siapa dan apa yang terjadi, dimana dan bilamana terjadi serta bagaimana terjadi, yang disusun oleh Pejabat NCC/PPKN untuk dilaporkan pada kesempatan pertama, setelah terjadinya suatu peristiwa menonjol atau krisis yang perlu diatensi, kepada Sekretaris dan Ketua.

Laporan Mingguan, Bulanan, Tri Wulan dan Tahunan disusun oleh Sekretariat NCC/PPKN untuk dilaporkan kepada Menko Polhukam sebagai Ketua NCC/PPKN. Laporan Khusus/memo Khusus adalah laporan informasi lengkap dan komprehensif yang disusun melalui proses analisis dari tim analis atau dengan Sekretaris NCC/PPKN dapat disertai dengan visualisasi dan pemetaan tentang suatu kejadian atau krisis dan dilengkapi dengan kesimpulan, saran dan rekomendasi untuk dilaporkan kepada Menko Polhukam sebagai ketua NCC/PPKN.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, serta untuk mengefektifkan upaya koordinasi dan sinergi penanganan krisis multidimensional yang berskala nasional, dalam

ALUR PENGELOLAAN KRISIS DI NCC

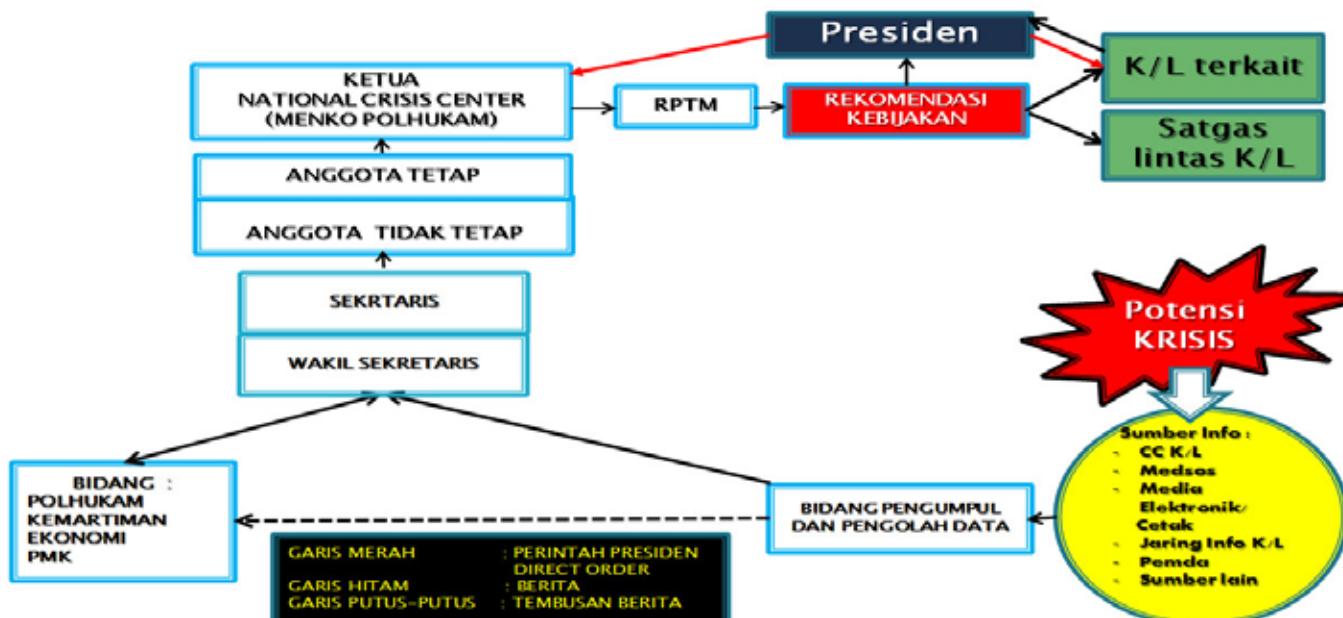


hal ini NCC/PPKN dapat merekomendasikan kementerian/lembaga terkait untuk membentuk satuan tugas. Satuan tugas dibentuk untuk percepatan penanganan krisis multidimensional yang berskala nasional sesuai dengan bidang tugasnya, serta dalam rangka optimalisasi penanganan krisis multidimensional yang berskala nasional, NCC/PPKN dapat melibatkan peran serta masyarakat secara cepat, tepat, terpadu, dan efektif. Adapun gambaran mekanisme kerja di NCC/PPKN dapat terlihat pada gambar diatas.

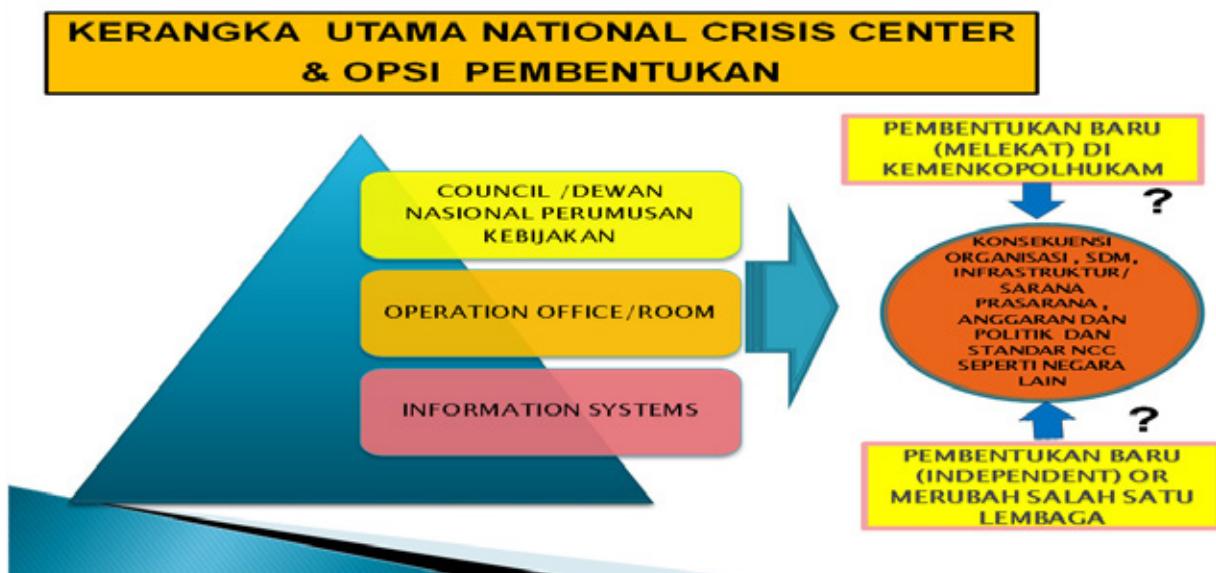
QUO VADIS PEMBENTUKAN PPKN/NCC

Tiga Kerangka utama di dalam NCC/PPKN adalah NCC/PPKN sebagai Council/Dewan nasional perumusan kebijakan nasional, Operation office room dan information system, tentunya apabila dibentuk di Kemenko Polhukam akan membawa konsekuensi dalam aspek organisasi, SDM, Infrastruktur/sarana prasarana, Anggaran dan standar NCC/PPKN sejajar dengan negara lain. Menindaklanjuti pembentukan NCC/PPKN di Kemenko

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL NCC/PPKN



Kerangka Utama PPKN/NCC



Polhukam dengan arahan dasar bahwa NCC/PPKN ini dibentuk tanpa adanya kriteria antara lain efektif, tidak ada tambahan khusus anggaran, menggunakan fasilitas yang ada dan beroperasi pada bulan Juni 2016. Secara *existing* bahwa embrio krisis ada di Kemenko Polhukam berupa ruang pemantau krisis nasional, yang belum memenuhi persyaratan apabila ditingkatkan statusnya menjadi NCC/PPKN. Pembentukan NCC/PPKN di Kemenko Polhukam sebaiknya merger dengan institusi Wantanas yang secara kebetulan perkantoran dan infrastucturnya menjadi satu dengan Kantor Kemenko Polhukam.

KESIMPULAN

Mewujudkan pembentukan NCC/PPKN guna kepentingan pembangunan bersifat mendesak sebagai rancang bangun keamanan nasional yang hendak diwujudkan sampai terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, didukung oleh situasi kondusif nasional dalam rangka mendukung pembangunan nasional, dengan mempertimbangkan krisis nasional yang bersifat multidimensional, dalam hal pembentukan NCC/PPKN dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Konsep Filosofis Pembentukan NCC/PPKN sebagai perumusan kebijakan nasional secara kolegial antara K/L dan masyarakat sebagai dasar penanganan

krisis nasional dalam forum/dewan perumusan kebijakan nasional.

- Memformulasi Konsep Operasional NCC/PPKN didasarkan pada aspek operasional sebagai implementasi kebijakan di derivatifkan pada mekanisme informasi dari krisis Center K/L, Pemda dan lainnya dalam bentuk pelaporan, sehingga arus informasi yang dikelola secara bertingkat dan berlanjut untuk bisa mendapatkan keputusan pada levelnya, sebagai proses Input informasi pada Eskalasi Krisis dari informasi inteljen, informasi Media DN / LN, Informasi Crisis Center (K/L dan Pemda), atau Informasi lainnya akan bersifat *Linier* via Rapat Pimpinan Tingkat Menteri (RPTM) dan perintah langsung Presiden.
- Merekonstruksi NCC/PPKN sebagai realisasi pembentukan NCC/PPKN, didasarkan pada aspek yuridis berupa Peraturan Presiden, Pembentukan organisasi NCC/PPKN, Pengawakan SDM, Pembangunan fasilitas dan infrastruktur, dan Pemenuhan anggaran.***



TRADISI UNIK DAN FILOSOFINYA DALAM MEMPERINGATI HUT RI

Oleh:
Tim Redaksi

Sudah menjadi tradisi yang berjalan puluhan tahun di Indonesia, dimana perayaan 17-an diwarnai oleh berbagai lomba yang seru dan mengasyikkan. Perlombaan yang digelar memiliki keunikan sendiri-sendiri dan mengundang gelak tawa para penontonnya. Sebut saja lomba panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, gebuk bantal dan masih banyak lagi. Pesta rakyat ini memang sangat menyenangkan dan membuat peserta lomba dan penonton terhibur.

Tradisi lomba yang kerap menghiasi perayaan HUT Kemerdekaan RI itu sudah muncul sejak tahun 1950-an. Masyarakat

sendiri yang memunculkan lomba-lomba itu sejak perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-5. Masyarakat kala itu begitu antusias ingin mengenang masa berjuang dengan cara memeriahkannya melalui kegiatan-kegiatan yang semarak. Bahkan presiden pertama Indonesia, Soekarno adalah salah seorang yang paling bersemangat dan mendukung lomba 17 Agustus-an. Inilah yang membuat tradisi lomba 17 Agustus semakin menyebar luas di seluruh tanah air. Tentunya dibalik kemeriahan perayaan HUT RI lewat berbagai lomba tersebut, ada filosofi atau makna yang terkandung.

UPACARA PENAIKAN BENDERA DETIK-DETIK PROKLAMASI

Walaupun setiap tanggal 17 Agustus ditetapkan sebagai hari libur nasional, tetapi sudah menjadi tradisi kantor-kantor pemerintah seluruh Indonesia dan bahkan kantor swastapun tetap memperingati dengan menggelar Upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI secara khidmat. Upacara ini selain membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan juga diadakan pengibaran Bendera Sang Saka Merah Putih oleh tim paskibraka. Untuk awal upacara peringatan detik-detik Proklamasi di Istana Merdeka sendiri dipimpin oleh Presiden RI selaku Inspektur Upacara. Seremoni peringatan di Istana Negara biasanya disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi nasional Indonesia dan pada sore hari dilaksanakan kegiatan penurunan bendera Sang Saka Merah Putih.

Namun ada yang berbeda dari rangkaian peringatan HUT ke-71 Kemerdekaan RI tahun ini, Presiden Joko Widodo menghadirkan pawai budaya lengkap dengan kereta kencana dan pasukan berkuda sambil mengarak Bendera Sang Saka Merah Putih. Pawai tersebut dimulai di lapangan Tugu Monas menuju Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Bendera Sang Saka Merah Putih diarak dengan kereta kencana yang ditarik oleh empat ekor kuda dan Bendera tersebut diserahkan ke Presiden Joko Widodo yang selanjutnya diserahkan ke Paskibraka untuk dikibarkan. Seremoni tetap bersifat khidmat, sederhana namun meriah. Rangkaian kirab budaya tersebut merupakan keinginan dari Presiden Jokowi sendiri. Presiden ingin menghadirkan sesuatu yang berbeda dan bisa dinikmati oleh masyarakat.

PANJAT PINANG

Panjat pinang adalah tradisi perlombaan yang merebutkan hadiah yang diletakkan di puncak pohon pinang. Peserta harus memanjat sampai pada puncak namun sulit karena pohon pinang sudah dilumuri pelumas sehingga licin. Peserta yang lebih dulu

berhasil mencapai puncak itulah yang menjadi pemenang dan berhak atas hadiahnya. Lantas, bagaimana sejarah dari lomba panjat pinang? Mengutip dari berbagai sumber, Panjat Pinang merupakan bentuk perlombaan dari jaman penjajah dan menjadi bahan tertawaan bagi yang menonton. Panjat pinang berasal dari tradisi pejabat zaman penjajahan Belanda yang sering menggelar acara besar seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Pesertanya orang-orang pribumi yang memperebutkan ‘barang mewah’ waktu itu. Biasanya bahan makanan seperti tepung, keju, gula dan pakaian. Saat ini panjat pinang sudah menjadi icon tersendiri bagi perayaan HUT Kemerdekaan RI yang dapat dijumpai di seluruh pelosok tanah air. Aspek kerjasama menjadi kunci keberhasilan menjadi pemenang.



BALAP KARUNG

Balap karung adalah sejenis olahraga yang dilombakan dengan peserta masuk ke dalam karung. Ada jarak tempuh yang ditentukan di lomba balap karung. Peserta yang berhasil lebih dulu mencapai garis finish dengan tanpa lepas dari karungnya itulah yang menjadi pemenang.

Sedangkan lomba balap karung, filosofinya adalah mengingatkan rakyat Indonesia saat masa-masa sulit dijajah Jepang. Dimana saat Indonesia dijajah Jepang, pakaian yang paling bagus yang bisa dimiliki oleh mayoritas rakyat ketika itu adalah berbahan karung goni. Balap karung ini juga telah menjadi salah satu lomba "wajib" untuk kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan RI.

GEBUK BANTAL

Salah satu tradisi unik lainnya saat perayaan HUT RI yaitu perlombaan Gebuk Bantal. Tradisi ini sudah dilakukan masyarakat Indonesia sejak turun-temurun. Lomba gebuk bantal adalah lomba yang dilakukan oleh dua orang yang saling berebut untuk menjatuhkan lawannya dengan menggunakan bantal. Dua orang ini duduk diatas sebatang bambu atau batang pohon pinang yang dibuat melintang dan dibawahnya biasanya air kolam atau persawahan. Aturan lomba adalah siapa yang berhasil memukul jatuh lawannya dengan menggunakan bantal maka dia lah pemenangnya. Tidak jauh berbeda dengan filosofi panjat pinang, gebug bantal memiliki filosofi mengingatkan kita betapa mudahnya penjajah mengadu domba bangsa Indonesia saat itu, hanya untuk memperebutkan hadiah. Melalui lomba seperti ini kita diingatkan untuk jangan mudah di adu domba. Disamping itu, nilai-nilai yang dipelajari dari lomba ini adalah kejujuran dan berjiwa ksatria untuk mengakui kelebihan orang lain dan secara ksatria menerima kekalahan.

TARIK TAMBANG/TALI

Tarik tambang/tali adalah sejenis olahraga tradisional yang dikenal luas di seluruh dunia dan bahkan dikatakan sebagai salah satu olahraga tertua dalam sejarah umat manusia. Tarik tambang juga sangat popular di kalangan masyarakat Indonesia yang ditampilkan pada acara-acara lomba di kalangan masyarakat. Pada peringatan peringatan 17 Agustus, lomba tarik tambang ini pasti menjadi salah satu lomba favorit. Lomba ini terdiri dari 2 tim yang saling berhadapan dengan jumlah

yang sama masing-masing tim. Yang berhasil menarik lawan sampai melewati garis batas tengah yang ditentukan, dinyatakan sebagai pemenang. Lomba tarik tambang memiliki makna kebersamaan, dan solidaritas masyarakat Indonesia. Disamping itu, sikap pantang menyerah ditunjukkan oleh para peserta lomba. Pantang menyerah merupakan sikap para pahlawan terdahulu yang wajib terus kita pelihara dan praktikkan dalam hidup berbangsa dan bernegara.



MAKAN KERUPUK

Acara ini sekarang biasa dimainkan oleh anak-anak, tapi pada masa dulu oleh orang dewasa. Caranya kerupuk digantung dengan seutas tali setinggi para peserta, dengan tangan terikat ke belakang para peserta berlomba menggapai dengan mulutnya hingga kerupuk yang digantung habis. Ini juga merupakan simbol keprihatinan tentang kondisi rakyat Indonesia saat zaman penjajahan ditunjukkan pula lewat lomba makan kerupuk yang dijadikan simbol pangan. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi rakyat Indonesia pada masa penjajahan. Sementara kebanyakan rakyat



Indonesia bersusah payah untuk bisa bertahan hidup, tetapi para penjajah justru hidup dalam kesenangan. Walaupun pada dasarnya banyak yang tidak memahami filosofi dibalik lomba ini, tetapi setidak-tidaknya hal ini membawa kemeriahan di kalangan masyarakat.

KARNAVAL KEMERDEKAAN

Karnaval peringatan HUT RI selalu dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Selain sebagai wujud rasa syukur dan memperkuat persatuan dan kesatuan antar masyarakat, karnaval ini juga sebagai salah satu upaya untuk menunjukkan kreatifitas serta keberagaman masyarakat Indonesia. Dengan demikian, jiwa-jiwa kreatif dan inovatif ditunjukkan dalam kegiatan ini. Pesan penting dari kegiatan ini adalah jangan pernah berhenti berkreasi dan berinovasi.

di masa mendatang. Tirakatan di malam kemerdekaan diharapkan agar kita mampu untuk selalu mawas diri dan merenungkan bahwa kemerdekaan yang didapat sekarang hanyalah awal dari perjalanan panjang Indonesia dan diharapkan untuk mampu menjaga harga diri bangsa dan mampu untuk bersyukur atas kemerdekaan yang dengan susah payah diraih oleh para pendiri bangsa kita. Malam tirakatan ini dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat, khususnya di daerah Jawa tengah, dimana setiap malam tanggal 17 Agustus masyarakat berkumpul di salah satu tempat untuk melakukan tirakatan dengan diawali pemanjatan doa-doa untuk para pahlawan negara, untuk kesejahteraan, kemakmuran, dan keselamatan bangsa dan negara. Biasanya setelah itu dilakukan makan bersama, setelahnya mereka akan semalam tidak tidur atau istilahnya melekan.



Sumber:payakumbuhkota.go.id

MALAM TIRAKATAN

Tirakatan dalam pengertian yang sesungguhnya adalah kegiatan mengintrokeksi diri tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Makna dari tirakat adalah melakukan perenungan dan introspeksi diri sambil mengenang apa yang sudah dilakukan pada masa lalu dan harus diperbaiki

Peringatan kemerdekaan yang meriah di seluruh pelosok tanah air, diharapkan bukan hanya peringatan atau perayaan belaka secara fisik tetapi menjadi momen bagi rakyat Indonesia untuk meningkatkan komitmen berbuat yang terbaik bagi Indonesia tercinta.***

Dirgahayu Indonesia.

BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN



KABARANAHAN KEMHAN
Laksda TNI Ir. Leonardi, M.Sc.

BADAN SARANA PERTAHANAN.

Badan Sarana Pertahanan selanjutnya disebut Baranahan adalah unsur pendukung tugas dan fungsi Kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Badan Sarana Pertahanan dipimpin oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan disebut Ka Baranahan. Badan Sarana Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana pertahanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Sarana Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pengelolaan sarana pertahanan;
2. Pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sarana pertahanan meliputi pengadaan jasa konstruksi dan sarana pertahanan, sertifikasi kelaikan, kodifikasi materiil, dan pengelolaan aset/barang milik negara di bidang pertahanan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sarana pertahanan; dan
4. Pelaksanaan administrasi Badan Sarana Pertahanan.

Secara struktural Baranahan terdiri dari Sekretariat dan lima Pusat:

1. SEKRETARIAT BADAN SARANA PERTAHANAN.

Sekretariat Badan Sarana Pertahanan selanjutnya disebut Sekretariat Baranahan adalah unsur pembantu Kepala Badan Sarana Pertahanan dipimpin oleh Sekretaris Badan Sarana Pertahanan disebut Ses Baranahan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Set Baranahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembukuan, pengelolaan administrasi keuangan, penilaian dan perhitungan anggaran, evaluasi dan laporan program kerja dan anggaran serta laporan akuntabilitas kinerja Badan;
- b. Pembinaan kepegawaian, administrasi keuangan, materiil, ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan;
- c. Pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi dan perpustakaan Badan;
- d. Koordinasi penyelenggaraan fora nasional dan internasional di bidang sarana pertahanan; dan
- e. Koordinasi dan supervisi staf.

Set Badan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Laporan,
- b. Bagian Data dan Informasi,



- c. Bagian Fora,
- d. Bagian Umum,
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. PUSAT PENGADAAN.

Pusat Pengadaan selanjutnya disebut Pus Ada adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Sarana Pertahanan Kemhan dipimpin oleh Kepala Pusat Pengadaan disebut Kapusada mempunyai tugas melaksanakan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan dari dalam dan luar negeri termasuk hibah serta penerimaan dan penyaluran dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pus Ada menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan barang dan jasa sarana pertahanan;
- b. Penyiapan administrasi pengadaan barang dan jasa sarana pertahanan;
- c. Pelaksanaan pengadaan Alat Utama Sistem Senjata, alat peralatan pendukung dan jasa pemeliharaan perbaikan, alat kesehatan dari dalam dan luar negeri termasuk hibah Matra Darat, Matra Laut dan Matra Udara;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pengadaan barang dan jasa sarana pertahanan;
- e. Pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang pengadaan barang dan jasa sarana pertahanan;
- f. Penyerahan hasil pengadaan barang dan jasa serta hibah kepada pengguna;

- g. Penyiapan perencanaan program dan anggaran serta evaluasi dan laporan; dan
- h. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Pus Ada terdiri atas:

- a. Bidang Matra Darat,
- b. Bidang Matra Laut,
- c. Bidang Matra Udara,
- d. Subbagian Tata Usaha,
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. PUSAT KONTRUKSI.

Pusat Konstruksi selanjutnya disebut Pusat Kon adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Badan Sarana Pertahanan Kemhan dipimpin oleh Kepala Pusat Konstruksi disebut Ka Puskon mempunyai tugas melaksanakan pengadaan jasa konstruksi sarana pertahanan.

Dalam melaksanakan tugas Puskon menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang jasa konstruksi sarana pertahanan;
- b. Penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran serta pelaksanaan perencanaan teknis bidang jasa konstruksi sarana pertahanan;
- c. Penyiapan administrasi dan pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi sarana pertahanan;
- d. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pekerjaan jasa konstruksi sarana pertahanan pelaksanaan bimbingan dan supervisi teknis di bidang;

- e. Penyerahan hasil pekerjaan jasa konstruksi kepada pengguna;
- f. Penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran serta evaluasi dan laporan hasil pekerjaan konstruksi; dan
- g. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Puskon terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan Konstruksi,
- b. Bidang Administrasi Pengadaan Konstruksi,
- c. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Konstruksi,
- d. Subbagian Tata Usaha,
- e. Kelompok Jabatan Fungsional,

4. PUSAT KELAIKAN.

Pusat Kelaikan selanjutnya disebut Puslaik adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Baranahan Kemhan dipimpin oleh Kepala Pusat Kelaikan disebut Kapuslaik mempunyai tugas merumuskan, menyiapkan dan melaksanakan serta evaluasi kebijakan teknis di bidang sertifikasi tipe dan kelaikan produk/sarana pertahanan matra darat, laut dan udara, sertifikasi sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan fasilitas pemeliharaan/perbaikan serta sertifikasi kualifikasi personel untuk penyelenggara kelaikan militer.

Dalam melaksanakan tugasnya, Puslaik menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penyiapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sertifikasi tipe (rancang bangun) dan kelaikan produk/ sarana pertahanan matra darat, laut dan udara;



- b. Evaluasi di bidang penerapan standar, aturan, pedoman, kriteria dan prosedur sertifikasi tipe (rancang bangun) dan kelaikan produk/sarana pertahanan matra darat, laut dan udara;
- c. Perumusan, penyiapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang sertifikasi sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra darat, laut dan udara;
- d. Evaluasi di bidang penerapan standar, aturan, pedoman, kriteria dan prosedur sertifikasi sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas produksi dan fasilitas pemeliharaan/perbaikan sarana pertahanan matra darat, laut dan udara;
- e. Penyiapan bahan tata cara penyelenggaraan sertifikasi tipe dan kelaikan sarana pertahanan matra darat, laut dan udara;
- f. Penyelenggaraan sertifikasi kualifikasi personel inspektur kelaikan militer matra darat, laut, dan udara;
- g. Pemberian bimbingan, supervisi teknis di bidang sertifikasi kelaikan sarana pertahanan, penerapan standar, aturan, pedoman, kriteria dan prosedur, dan sertifikasi sistem jaminan/manajemen mutu fasilitas pemeliharaan/perbaikan yang ada di angkatan;
- h. Pemberian bimbingan, supervisi teknis di bidang sertifikasi tipe, kelaikan sarana pertahanan, penerapan standar, aturan, pedoman, kriteria dan prosedur, serta dibidang sertifikasi sistem jaminan/ manajemen mutu fasilitas pemeliharaan/ perbaikan di Fasilitas Produksi;
- i. Penyiapan perencanaan program dan anggaran serta evaluasi dan laporan; dan

- j. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Puslaik terdiri atas:

- a. Bidang Kelaikan Darat,
- b. Bidang Kelaikan Laut,
- c. Bidang Kelaikan Udara,
- d. Subbagian Tata Usaha,
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. PUSAT KODIFIKASI.

Pusat Kodifikasi selanjutnya disebut Puskod adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Baranahan Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Kepala Pusat Kodifikasi disebut Kapuskod Baranahan Kemhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan administrasi kodifikasi materiil pertahanan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Puskod Baranahan Kemhan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kodifikasi materiil pertahanan;
- b. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembinaan dan administrasi kodifikasi materiil pertahanan;
- c. Pelaksanaan operasional kodifikasi materiil pertahanan;
- d. Perumusan dan pelaksanaan dukungan teknis kodifikasi serta pembinaan fungsional kataloger;
- e. Koordinasi penyelenggaraan katalogisasi dan kodifikasi materiil pertahanan baik bilateral maupun multilateral;
- f. Pemberian bimbingan dan supervisi

teknis di bidang kodifikasi materiil pertahanan;

- g. Penyiapan pengembangan kodifikasi dan sistem informasinya;
- h. Penyiapan perencanaan program dan anggaran serta evaluasi dan laporan Pusat, dan
- i. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Pukod terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan Administrasi Kodifikasi,
- b. Bidang Operasional Kodifikasi,
- c. Bidang Dukungan Teknis Kodifikasi,
- d. Subbagian Tata Usaha,
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. PUSAT BARANG MILIK NEGARA.

Pusat Barang Milik Negara selanjutnya disebut Pus BMN adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Baranahan dipimpin oleh Kepala Pusat Barang Milik Negara disebut Kapus BMN bertugas menyiapkan dan melaksanakan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtempahan, pembinaan dan pengendalian serta pengamanan dan pemeliharaan BMN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pus BMN menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pembinaan dan pengendalian BMN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;



- b. Pelaksanaan administrasi pengamanan dan pemeliharaan BMN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;
- c. Pelaksanaan pengadaan dan persertifikatan tanah di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan pemanfaatan, penghapusan, pemindahtempahan, penatausahaan, pembinaan dan pengendalian serta pengamanan dan pemeliharaan BMN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;
- e. Pelaksanaan inventarisasi, penilaian, serta dokumentasi BMN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;
- f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi serta laporan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, pemindahtempahan, pembinaan dan pengendalian serta pengamanan dan pemeliharaan BMN di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI;
- g. Penyiapan program dan anggaran serta evaluasi dan laporan; dan
- h. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat.

Pus BMN terdiri atas:

- a. Bidang Barang Milik Negara I,
- b. Bidang Barang Milik Negara II,
- c. Bidang Barang Milik Negara III,
- d. Subbagian Tata Usaha,
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.***



www.kemhan.go.id

MEDIA INFORMASI KEMENTERIAN PERTAHANAN

WiRA

A CLOSER LOOKS TO TECHNICAL
COMPETENCIES TEST



QUO VADIS FORMATION OF INDONESIAN
NATIONAL CRISIS CENTRE (NCC)

UNIQUE TRADITIONS IN CELEBRATING
INDONESIAN INDEPENDENCE DAY

THE PROFILE OF MOD DEFENSE FACILITIES
AGENCY

DR. SUYOTO HOSPITAL PLENARY
ACCREDITATION CERTIFICATE
(WORKING VISIT OF MINISTER OF
DEFENSE AND CELEBRATION OF 48TH
ANNIVERSARY OF REHABILITATION
CENTER OF MINISTRY OF DEFENSE)

ISSN 1693-0231



9 771693 023126

**THE MINISTER OF DEFENSE
AND THE STAFFS OF THE MINISTRY OF
DEFENSE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**



**CONGRATULATES
INDONESIA FOR IT'S 71
ANNIVERSARY**

Editorial

Dear readers,

We are back to greet the readers with the latest edition of July-August 2016 WIRA. This edition coincides with the 71st Anniversary of Indonesia Independence. The editorial team presents some articles such as a closer looks to technical competencies test, dr. Suyoto hospital plenary accreditation certificate (working visit of Minister of Defense and celebration of 48th anniversary of Rehabilitation Center of Ministry of Defense), Quo vadis formation of Indonesian National Crisis Centre (NCC) and Unique traditions and their philosophy in celebrating Indonesian independence day also the Profile of Defense Facilities Agency of Ministry of Defense.

Readers WIRA,

To enrich the WIRA magazine articles, we always expect the participation of readers to send us your thoughts, either in the form of articles, opinions, information, comments or critics and suggestions. For those who want to get WIRA magazine, may contact us via email: redaksi.wira@kemhan.go.id. The magazine can also be accessed online at www.kemhan.go.id.

May Indonesia be Glorious.

Contents

EDITORIAL BOARD

Advisors:

Minister of Defense
General (Ret.) Ryamizard Ryacudu

Secretary General of MoD
Vice Admiral Widodo, M.Sc

Editor in Chief:

Head of Public Communication Center
of MoD
Brig. Gen. Djundan Eko Bintoro, M.Si (Han)

Managing Editor:

Chief of Information Cooperation of Public
Communication Center
Col. Drs. Silvester Albert Tumbol, M.A.

Editors:

Ltc. Joko Riyanto, S.Sos, M.Si.

Mutiara Silaen, S.Ikom, M.AP

Graphic Design:

1st Lt. Farah Merila S, S.Kom.

Imam Rosyadi

Photo:

Photographers of Public Communication
Center of MoD

Circulation:

Nadia Maretti, S.Kom, M.M.

Published by:
Public Communication Center of MoD,
Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta

A CLOSER LOOKS TO TECHNICAL COMPETENCIES TEST



Gambar 1.1 Lingkup Kompetensi

Competencies are combination of knowledge, skills and attitude towards one's job. Knowledge is information that is formed from individual's understanding and potentials. Skill is individual's capacity to perform a variety of tasks.

Dr. SUYOTO HOSPITAL PLENARY ACCREDITATION CERTIFICATE (WORKING VISIT OF MINISTER OF Defense AND CELEBRATION OF 48TH ANNIVERSARY OF REHABILITATION CENTER OF MINISTRY OF DEFENSE)



The plenary accreditation level achieved by dr. Suyoto Hospital is expected to increase public confidence, especially those in Ministry of Defense and TNI for their health services. In addition to that, public demands on plenary hospital also require appropriate resources that capable to give plenary standards services, including human resources, medical equipment, and supporting facilities that should meet customer expectations.



QUO VADIS FORMATION OF INDONESIAN NATIONAL CRISIS CENTRE (NCC)

What we can see so far, both issues and handling of multidimensional national crisis including the implementation of its management have not yet been fully coordinated or well integrated. Several examples of these conditions can be seen in some emergency faced by Indonesian citizens overseas, as well as foreign powers that deliberately violate our sovereignty by trespassing our region.



UNIQUE TRADITIONS AND THEIR PHILOSOPHY IN CELEBRATING INDONESIAN INDEPENDENCE DAY

The celebration of 71st Independence Day is slight different. For the first time, President Joko Widodo decorated the ceremony by the cultural parade. Indonesia first red and white flag was carried out by horse drawn carriage from then National Monument to the State Palace.



THE PROFILE OF MOD DEFENSE FACILITIES AGENCY

Defense Facilities Agency (*Baranahan*) is the supporting element of tasks and functions of the Ministry. It is under and is responsible to the Minister. It is led by the Chief of the Defense Facilities Agency (*Ka Baranahan*) whose task is to manage defense infrastructure.

A CLOSER LOOKS TO TECHNICAL COMPETENCIES TEST

By:

Wina Christiana,S.E., M.AP

Junior Assessor of Personel Bureau Secretariat General of Ministry of Defense

INTRODUCTION

"What are technical competencies for?" The question was asked by majority of employees who did problem validity test and technical competencies test in Ministry of Defense. Various pessimistic thoughts on the end result of technical competencies test also appear. This is due to novel introduction of technical competencies test in Ministry of Defense that creates both pros and cons on the implementation results. However, technical competencies test is within the scope of

human resources management. Based on Regulation of Minister of State Administrative and Bureaucratic Reform Number 41 of 2012 on Functional Position of Administrative Human Resources Assessor and Credit Points, in which the assessor has been given duties, responsibilities, authorities and rights in full by competent authorities to conduct competency assessment.

Assessment Center in human resource management in Ministry of Defense has conducted its functions on assessment of



Figure 1.1 : Slope of Competence

employees' competencies. Competencies are combination of knowledge, skills and attitude towards one's job. Knowledge is information that is formed from individual's understanding and potentials. Skill is individual's capacity to perform a variety of tasks. On the other hand, attitude is tendency to act toward object, person or event. Measurement and assessment is not only limited to assessment of behavior or managerial competencies but also towards ability on scientific fields or technical competencies of employees.

MANAGERIAL AND TECHNICAL COMPETENCIES

Below is short review towards differences between managerial competencies and technical competencies. Managerial competencies are abilities possessed by a person judged from his/her behaviors, namely cognitive behavioral (thinking) as aspects in intelligence, affective related to emotion, and motivation and psychomotor related to motoric movement. Managerial competencies are used to identify individual characters corresponding to intended position and detecting inclination of individual managerial potencies in position (out of his/her technical abilities). The assessment of technical competencies is more on assessing individual scientific abilities paired with one's current position.

Managerial competencies are based on Behavioral Competency Dictionary. Technical competencies are based on Technical Competency Dictionary formulated by assessors in the Ministry of Defense. Currently, the Assessment was inclined to assess managerial competencies or managerial capabilities that can be detected from behavior during observation and simulation in Assessment Center implementation. Based on the importance of assessment skills and abilities in technical competence science, Technical Competency Dictionary has been compiled since 2013 by matching the competencies needed with job positions in Ministry of Defense. Technical Competencies Dictionary process has been

started in March to August 2013, followed by revision of Technical Competency Dictionary in 2015 to accommodate alignments due to dynamic job-desks that have to be covered in Ministry of Defense.

Technical competencies assessment refers to competencies standard. The technical competencies standard is expected to be an added value that enriches assessors' assessment towards technical capabilities of the assessed. Competencies standard cannot be done overnight, therefore continuous suggestions and feedbacks are necessarily being done for its refinement. Technical competencies dictionary of Ministry of Defense was started by internal assessors within the Ministry and supported by expert independent consultants. Collaboration of both has been resulted in Technical Competency Dictionary that formulated from various disciplines that can be further used as employee standard technical assessment for all working units in the Ministry.

Competencies assessment is the process of comparing one's competencies with preliminary competencies for intended job that can be assessed through technical competencies test. Technical competencies test is used as one of assessment standard towards employee from echelon III and IV of the Ministry of Defense. Group of 14 (fourteen) examinations related to Job Family in Ministry of Defense is based on Technical Competencies Dictionary. This dictionary contains information on field competencies and specific or related to a certain particular tasks, and it also inclined toward competency based on Job Family.

Each Job Family has different competencies with their own descriptions. The core competencies cover:

- a) Defense Strategy Management;
- b) Defense Planning and Development Management;
- c) National Defense Potentials;

- d) Defense Forces Management;
- e) Defense Research Development Management;
- f) Defense Facilities Management;
- g) Defense Information Systems Management;
- h) State Financial Management;
- i) Supervision and Examination;
- j) Defense Health and Rehabilitation Management;
- k) Law and Legislation;
- l) Organizational Development and Human Resources Management;
- m) Public Service, and
- n) Public Communication.

TECHNICAL COMPETENCIES CONSIST OF ROOT, TRUNK, BRANCHES AND LEAVES COMPETENCIES

Root competencies are the core of all competencies in the Job Family, for example is State Financial Management Job Family. The core competencies have global characteristics. The Trunk Level Competencies derived from the core competencies and represent areas of competencies in the Job Family. The example in this case is the State Financial Management Job Family. The trunk level of competencies have functional-segmented natures and represent particular tasks within a large organizations.

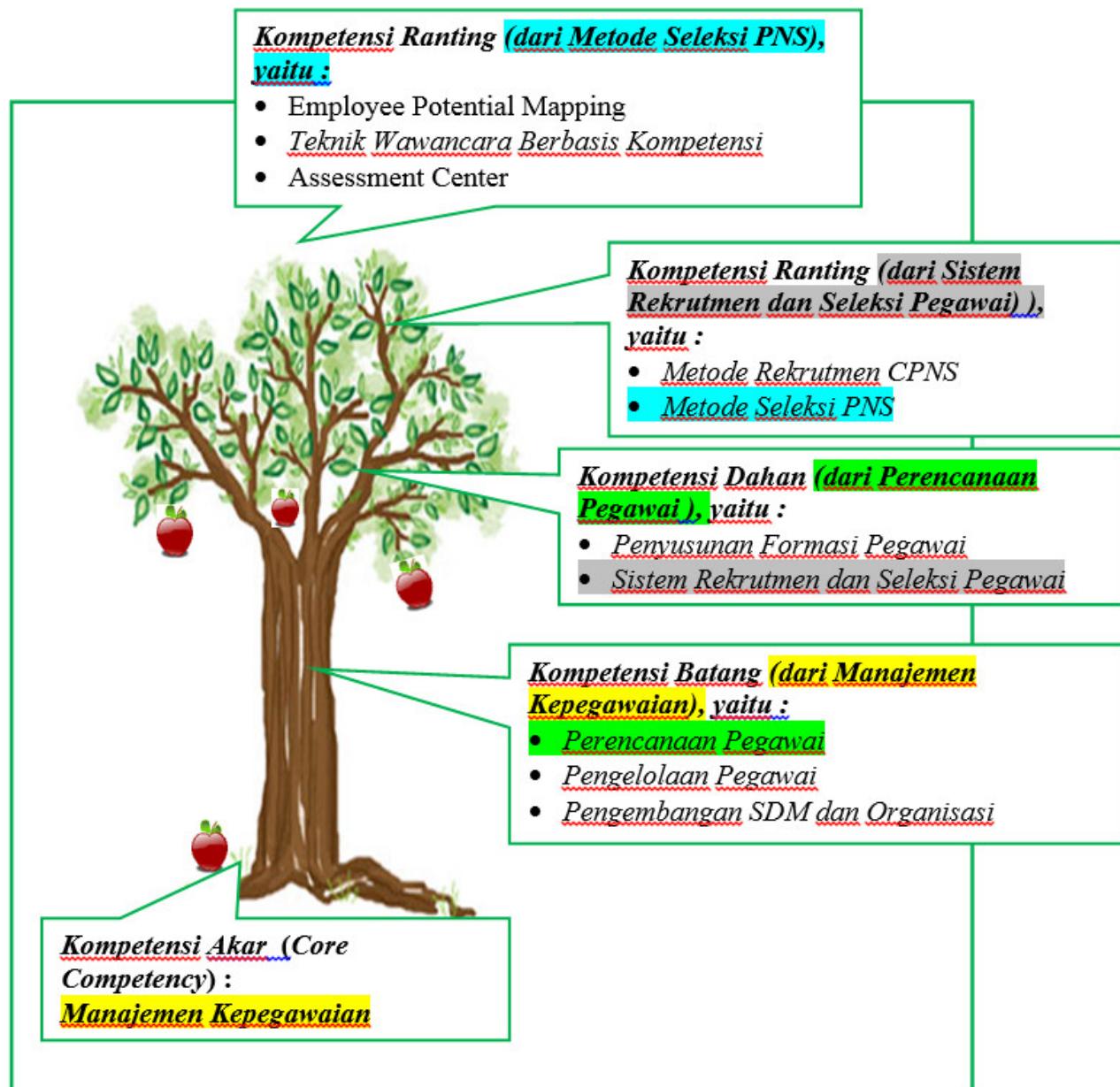
The Branch level of Competencies is a derivative of trunk competencies and representing specific area of competencies. The branch level of competencies is more specific and detailed. The branch level of competencies is usually associated with certain knowledge and skills that covered by the trunk level of competencies.

The leave level of competencies is derived further from the branch level of competencies. It covers very specific competencies in which skill is a dominant factor rather than knowledge, and it is simpler. Each level of competencies has different levels, and root, trunk, branch and leave level of competencies are composed of a variety of levels from level 1 (one) to level 4 (four) that associated with one's proficiency level, namely:

- Level 1 covers proficiency in the level of Awareness/Introductory/Basic Knowledge.
- Level 2 covers proficiency in the level of Novice/Basic/Limited Experience.
- Level 3 covers proficiency in the level of Intermediate/Practitioner/Applied.
- Level 4 covers proficiency in the level of Mastery/Analyst/Advanced.
- The highest level is the level of proficiency of Expert/Specialist.

Technical competencies are competencies on branch of knowledge in tasks implementation at the working unit (not work force competencies). In this case, competencies in State Financial Management are not absolutely limited to work units at Financial Center, Planning Bureau, and Defense Planning Directorate, but for all employees who work specifically in state financial management, such as Administration Heads across working units in Secretary General of Ministry of Defense or in Division of Program and Budget in each Directorates that deals with State Financial Management. Similarly, Law and Legislation Competencies are not limited to Directorate of Law and Legislation but also in the scope of security that associated with Law and Legislation competencies such as Legal Development.

Rehabilitation Centre and Directorate of Health should be referred to competencies in Defense Health and Rehabilitation Management. However, those two institutions



should be differentiated by their main tasks hence different competencies should be fulfilled according to the classification. Examinations were then adjusted to the respective duties referring to technical tasks faced by employee in performing their tasks in each working unit.

Technical competence test in Ministry of Defense was initiated by Technical Competencies Dictionary created by assessors with expert consultants that resulted in 14 (fourteen) classifications of scientific fields known as Job Family. Each classification became core competencies that have trunks, branches, and leaves. A certain Post Competencies Profile

contains Technical Competencies Profile and Behavior (managerial) Competencies Profile for their respective positions ranging from Head of Unit of Echelon II, III and IV in Ministry of Defense. Each post has its own managerial and behavior competencies. Therefore, based on Technical Competencies Dictionary and Post Competencies Profile, the examination questions were made in the form of multiple-choice and essay for echelon II, III and IV. Validity test on the examination questions were conducted randomly. The examination papers consist of materials in accordance to Job Family specifications. The valid examination paper then tested upon the echelon III and IV

in Ministry of Defense. All officials are obliged to undertake test as in accordance to their current positions and also allowed to choose other scientific fields (outside their technical competence field).

VALIDITY TEST AND TECHNICAL COMPETENCIES TEST

The examination validity test was conducted through sampling in Ministry of Defense by giving questions with technical characteristics on individual scientific fields. The technical competence test was given to echelon III and IV officials in all working units from 17 May 2016 to 27 May 2016. Technical competencies assessment results are being used to measure the ability of knowledge (field of study) of individuals that will be compared to technical competence standard for a post. Assessment result is in the form of % (percentage) material knowledge in the specific scientific fields. Following that, the assessor will recapitulate assessment on technical competence test of echelon III and IV, as well as doing analysis on various sources towards outcome of each individual technical competencies test. The

result of that individual test will be reported to the stakeholders in Ministry of Defense.

ENDING

Hopefully all employees can see the importance of technical competencies test by reading this review, therefore reducing negativity towards this objective assessment method. The measurement standard used is not individual standards but official minimum standard that should be fulfilled by candidate of a particular structural position. Competency test is not intended to assess a person's intellectual but more towards assessment on managerial and technical capabilities. Implementation of technical competency test is expected to create quality standards on every level of structural positions in Ministry of Defense. However, the concept-maker (assessors and expert consultants) still needs continuous and ongoing improvements as well as synergy with the implementation-person (officials who have structural positions) as a source of relevant information to determine the future technical competencies standard.***



Dr. SUYOTO HOSPITAL PLENARY ACCREDITATION CERTIFICATE (WORKING VISIT OF MINISTER OF DEFENSE AND CELEBRATION OF 48TH ANNIVERSARY OF REHABILITATION CENTER OF MINISTRY OF DEFENSE)

By:

Erlin Sudarwati, SKM., MM

Head of Subsection of Information and Data at Rehabilitation Center of Ministry of Defense

INTRODUCTION

Rehabilitation Center of Ministry of Defense is a supporting element that implement defense tasks and functions under and/or responsible to the Minister through Secretary General. The main task of Rehabilitation Center of Ministry of Defense is to implement part of Ministry's main tasks in medical rehabilitation, vocational rehabilitation, social rehabilitation and hospitalization.

Dr. Suyoto Hospital is Technical Implementation Unit under and/or responsible to the Head of Rehabilitation of Ministry of Defense. Dr. Suyoto Hospital carry out the tasks of medical services, medical support, and integrated medical rehabilitation, as well as research and development in a comprehensive medical rehabilitation center as in accordance to provisions of stipulated law and legislation.

In order to improve service quality, any



Hospital should do regular accreditation of at least every 3 (three) years. Hospital Accreditation Commission use accreditation assessment version 2012 has carried out accreditation assessment for Dr. Suyoto Hospital.

WORKING VISIT OF MINISTER OF DEFENSE TO REHABILITATION CENTER OF MINISTRY OF DEFENSE

On Wednesday, 24 August 2016, Minister of Defense - Ryamizard Ryacudu, conducted a working visit to Rehabilitation Center of Ministry of Defense. In that occasion, Minister of Defense met some personnel with disability who are conducting Integrated Rehabilitation activities at the Center. Series of activities during that visit were:

- a. Handing dr. Suyoto Hospital Accreditation Plenary Certificate by Executive Head of Hospital Accreditation Committee to Minister of Defense.
- b. Celebration of 48th Anniversary of Rehabilitation Center of 6 July 2016.
- c. Visiting Exhibition of Integrated Rehabilitation of Personnel with Disability in Rehabilitation Center of Ministry of Defense.

In that event, many first echelon and second echelon officials in Ministry of Defense and Armed Forces, officials from Ministry of Health, as well as other invited guests were presence.

Dr. SUYOTO HOSPITAL PLENARY ACCREDITATION

Law Number 44 of 2009 on Hospital states that in an effort to improve service



quality, Hospital must be regularly assessed for accreditation of at least once in every 3 (three) years. Authorized Board to conduct such accreditation is Commission on Accreditation of Hospitals that oversees and sets up hospital services quality guidance.

Hospital Accreditation itself is a recognition given to the Hospital by the government through authorized board in order to meet Government standards that have been set. An accredited hospital is received recognition from the government for its infrastructure, facilities and procedures that have followed applicable standards.

Accreditation assessment is based on Service Standards that focus on patients, Hospital Management Standard, Patient Safety, and Millennium Development Goals. Service standard that focus on patients is divided into seven chapters, namely (1) Access to Care and Continuity of service; (2) Rights of Patients and Their Families; (3) Patients Assessment; (4) Patient Services; (5) Anesthetics and Surgical Care; (6) Management and Use of Drugs; and (7) Patients and Their Family Education.

Hospital management standard is divided into



six chapters, namely (1) Quality Improvement and Patient Safety; (2) Infection Prevention and Control; (3) Governance, Leadership, and Direction; (4) Facility Management and Safety; (5) Staff Qualifications and Education; and (6) Information and Communication Management.

Hospital patient safety goals are divided into six objectives, namely (1) Target in patient identification accuracy; (2) Target in increasing effective communication; (3) Increasing drug safety; (4) Certainty in right location, proper procedures, and appropriate surgical patient; (5) Reducing infection risks due to health care services; and (6) Reducing the risk of falls.

Target of Millennium Development Goals is divided into three objectives, namely (1) Reduction of child mortality and improvement of maternal health; (2) The decrease in morbidity of HIV/AIDS; and (3) Decrease in tuberculosis morbidity rate.

Graduation level is divided into three categories, namely: basic, intermediate, primary, and plenary. Plenary is the highest graduation level that can be achieved by the Hospital. Hospital with a plenary level certificate show that it has passed some assessment in working

programs, including: access and continuity of care, medication management, patient and family education, and patient safety.

Hospital accreditation goal is to increase respect of patients' rights and to involve them in treatment process as partner. Moreover, it can improve image and public confidence that the hospital has made efforts to improve health care quality based on patient safety. Hospital will also have sufficient capital to negotiate with health insurers and other payers based on complete data on hospital services quality.

Dr. Suyoto Hospital has been awarded with "plenary" level after an assessment for hospital accreditation version 2012 by surveyor team from Hospital Accreditation Commission on 26-28 April 2016. This hospital accreditation has been worked on for a long time, as it needs support, passion and extraordinary commitment from the entire management and staff of dr. Suyoto Hospital. After 3 years preparation after have had received basic level of accreditation in 2009, dr. Suyoto Hospital has been continued to improve its infrastructures, human resources and policy tools – the legal basis that is derived from national policy.

The plenary accreditation level achieved by dr. Suyoto Hospital is expected to increase public confidence, especially those in Ministry of Defense and TNI for their health services. In addition to that, public demands on plenary hospital also require appropriate resources that capable to give plenary standards services, including human resources, medical equipment, and supporting facilities that should meet customer expectations. Plenary level Accreditation obtained by dr. Suyoto Hospital is expected to continue the consistency on standards of management and staffs of the hospital.

Plenary level accreditation achievement is a great honor and also asks for more obligations to further improve service quality to meet needs and expectations of patients who seek health care at dr. Suyoto Hospital. The Surveyor will still continue assessment on components of accreditation annually, so dr. Suyoto Hospital must remain vigilant in its service commitment that should always follow applicable policies and Standard Operating Procedures (SOPs) that has been designed with improved service quality.

Plenary level predicate is marked by handing over Plenary Accreditation Certificate from Executive Head of Hospital Accreditation Committee - Dr. dr. Sutoto M.Kes to Minister of Defense - Ryamizard Ryacudu who then give it to Head of Rehabilitation Center of Ministry of Defense – First Admiral dr. Janti Undari, MKK, MSi (Han) as well as give pin of Accreditation to Head of dr. Suyoto Hospital - Colonel Health dr. Satriyo Budi Utomo, SpKFR, MARS.

CELEBRATING REHABILITATION CENTER ANNIVERSARY

In its history, Rehabilitation of Minister of Defense was started around 1960s with a desire to pay tribute to Veteran/Armed Forces personnel who became handicapped. Several prominent Veterans had the idea to build a rehabilitation center for personnel with disability and then build it into Veteran Hospital. In 1968, the written document - Script on Rehabilitation Center Project of Armed Forces/ Veteran had been completed in Bintaro, South Jakarta. In the same year, there was Minister of Defense/Armed Forces Commander Decree No. Kep/A/273/1968 on 6 July 1968 on delegation



of authority of rehabilitation for disabled Armed Forces personnel/Veterans from Department of Transmigration and Veterans to Department of Defense and Security (now Ministry of Defense). Since then, that Rehabilitation Center was officially became the forerunner of what is today's Rehabilitation Center.

The date 12 July 1979 was once used as the inauguration of Rehabilitation Center. However, the amendment was made, and with Decree of Secretary General of Ministry of Defense No. K/661/IX/ 1991 on 11 October 1991, the date 6 July 1968 was being stipulated as the inauguration of Rehabilitation Center of Ministry of Defense.

Celebrating anniversaries of Rehabilitation Center then become an important momentum to remember history of this establishment and to evaluate implemented tasks – whether the efforts have been sufficient enough to be able to make independent and productive people with disabilities.

In its 48th anniversary on 6 July 2016, the Rehabilitation Centre has made series of activities including social activities, sporting events, scientific activities, pilgrimages,



ceremony and celebration. The celebration itself was held on 24 August 2016 that coincides with Working Visit of Minister of Defense and acceptance of Plenary Accreditation Certificate. On that occasion, Minister of Defense lead the celebration by cutting the tumpeng cone and give it to the Head of Rehabilitation Center of Ministry of Defense.

EXHIBITION OF INTEGRATED REHABILITATION

Rehabilitation Center of Ministry of Defense conducts Integrated Rehabilitation that covers Medical Rehabilitation, Vocational Rehabilitation, Social Rehabilitation, and hospitalization. Integrated Rehabilitation is to restore and develop physical abilities, physical skills, mental, and social skills. Therefore, Personnel with Disabilities will be able to become independence, have confidence, and can carry out a social function in society according to their ability in order to become self-reliant and productive.

During Working Visit to Rehabilitation Center, Minister of Defense and his entourage had the opportunity to see exhibition on Integrated Rehabilitation of Ministry of Defense and Armed Forces personnel with disability. In addition

to that, exhibition from Vocational rehabilitation displayed the work of personnel with disabilities who participate in Integrated Rehabilitation that consist of 15 majors skills such as vehicle auto-mechanical skill, motorcycle mechanical skill, computer operator, computer engineering, sewing, cooling techniques, integrated farming, music, electronics, graphic design, photography, welding, massage, carpentry, and culinary.

Medical Rehabilitation section showed the Commuter Medical Rehabilitation (Orthotic Prosthetic Repair Vehicle). Minister of Defense had the opportunity to give tools and body replacement (Orthotic Prosthetic) symbolically to participant of Integrated Disability Rehabilitation - Kopka Suwardi who received Prosthetic hand (prosthesis) and Kopka Kabul Setya Budi who received Special Wheelchair.

In Social Rehabilitation Section, there was a show exhibition of Wheelchair Tennis athletes. In addition to that, there was also photo exhibition of athletes who had won national and international sports medals. Besides Wheelchair Tennis, other sports that have been developed in Rehabilitation Center are Shooting and Diving. Social rehabilitation field also shows Fingerprint Talent Test or (Dermatoglyphics Multiple Intelligence) that is used as one of assessment for People with disabilities from Ministry of Defense and Armed Forces before determining skill development that they want to pursue.***

QUO VADIS FORMATION OF INDONESIAN NATIONAL CRISIS CENTRE (NCC)

By :

Colonel Tech Dr. Sigit Priyono, GSC, S.IP, M.Sc

Head of ASEAN Politics and Defense, at Coordinating Ministry of Politics, Legal and Security Affairs



Source: maritim.go.id

INTRODUCTION

Government of the Republic of Indonesia has implemented democratic political system that places community as an integral part in national jurisdiction system development. Government institution is a component that has authority and obligation to protect citizens beside maintaining country's sovereignty and territorial integrity, as well as having active role in creating world peace. Increased notion of nationalism in international context cannot be separated from multidimensional threats in crisis escalation locally and nationally. In this case, state institutions should ensure crisis

management can works well, both of its physical and psychological aspects. The physical aspect covers certainty and safety of the nation, while psychological aspect covers safety feeling in facing multidimensional crisis.

What we can see so far, both issues and handling of multidimensional national crisis including the implementation of its management have not yet been fully coordinated or well integrated. Several examples of these conditions can be seen in some emergency faced by Indonesian citizens overseas, such as: First, evacuation of 1684 Indonesian citizens who were trapped in Yemen's conflict in April 2015;

Second, rescue of 26 Indonesian citizens during earthquake crisis in Nepal; Third, Illegal Fishing and territorial violations in Natuna waters and during handling Indonesia citizens as hostage in the Philippines.

Not fully coordinated and seemingly sectorial in Ministry/Institution crisis handling only make crisis become a national political stage of various actors, such as Bureaucrats in Ministry/Institution Actors, political parties' actors, academia and other communities actors. Handling multidimensional national crisis then is treated as a unique and trending topic issue.

The President has seen importance and urgency of a national crisis center. This facility should be treated as public good and should be put under accountable state and national political authority. Therefore, if the crisis arises, protection and safety of citizens should be treated at the utmost importance, both inside and outside of country. In reference to that, the President has instructed Coordinating Ministry of Politics, Legal and Security Affairs on 4 April 2016 on Establishment of Joint Task Force Command (JTFC) at TNI Headquarters and Crisis Center in Coordinating Ministry of Politics, Legal and Security Affairs. Henceforth, the crisis center is "an office or agency that services as a clearinghouse for information and coordinates action during an emergency or disaster." The basic question of this article: First, How Policy and Crisis as a basis for formulation of policies; Second, How Escalation and Designation of National Crisis; Third, How is NCC Operational Concept; and Fourth, How to reconstruct as realization of establishment of NCC.

QUO VADIS POLICY AND CRISIS

Crisis in Chinese language is *Wei-jī*. It has two meanings, "danger" and "opportunity" - two sides of the same coin. On the other hand, crisis - derived from Greek - crisis, means "decision." Crisis according to Indonesian Dictionary is a state that has characteristic of crucial, turmoil, dingy, an event of decisive moment in which the situation has becomes dangerous and therefore decisions have to be

taken. In Military Dictionary, crisis can be found in anatomy of tensions and disputes - it is a continuation of escalated conflict, in which the circumstances have become abnormal due to tension that might also resulted from physical clashes that threaten national stability and lead to danger. Steven Fink argued, "a crisis is an unstable time or state of affairs in the which a decisive change is impending - either one with the distinct possibility of a highly desirable and extremely positive outcome, or one with the distinct possibility of a highly undesirable outcome. It is usually a 50-50 proposition, but you can improve the odds." Webster Dictionary has formulated crisis management as "a turning point for better or worse or a decisive moment or a crucial time." It is also "a situation that has reached a critical phase." Furthermore, Steven Fink stated, "Crisis Management is the art of removing much of the risk and uncertainty to allow you to achieve more control over your own destiny." Based on those descriptions, crisis management essence is attempts to suppress risk and uncertainty factors to the lowest level as possible, thus the certainty factors can be shown as much as possible. Uncertainty, risk and certainty conditions are actually established and distinguished by informative inputs on alternatives that can be explored and pursued, as well as on probabilities related to alternatives that can be taken, and estimations on what has happened.

The Center is core, central and should be driven towards all activities that involve state and non-state actors. Crisis Center is "an office or agency that services as a clearinghouse for information and coordinates action during an emergency or disaster." NCC concept that has been outlined by the small team is national instrument that formulate and make national policy. However, it should be implemented, controlled and monitored via Media, space, network, technology and human resources of special competence as well as High Minister Meeting led by Coordinating Minister of Politics, Legal, and Security Affairs to formulate National Policy.

National Power. National Power Theory

offers an opinion that state political strength as a means to achieve national goals and national strength. National strength itself is integration of economic, political, and moral strength, as well as various other national power elements. Usually we consider eight elements of national power as Geography, Natural Resources (Food, Raw Materials), Industrial Capacity, Military Preparedness (Technology, Leadership, Quantity and Quality of Armed Forces), Population (Distribution, Trends), National Character, National Morale, Quality of Diplomacy, and Quality of Government (J. Morgenthau, 1947), National power is a deterrent power, the power of survival, power of national growth and development that determined by geography and natural resources condition, as well as characteristic of the nation and its government. In Indonesia, the concept of national power is translated into national resilience - the condition of ductility and toughness of nation. In this particular context, it is to build up quality of good governance as well as carrying out bureaucratic reform, specifically national crisis handling system that able to handle multidimensional type of crisis. NCC is very urgent and very important in the scope of public service as a central command control to serve and to protect the citizens in crisis situation.

NCC Public Policy Implementation generally face three main obstacles, First, formulation of great and grandiose plan but difficult to implement; Second, public policy determination – public assumptions that the policy implementers have already had knowledge and understanding, therefore will immediately receive sanctions otherwise; Third, policy implementation is an autopilot activity – it is assumed that the activity can run by itself.

QUO VADIS ESCALATION AND DESIGNATION OF NATIONAL CRISIS

Determination of National Crisis must set course by national political authority – the President who has received legitimization or mandate from the people to consider Ministry/Institutions and Local Government recommendations by High Level Meeting at

Ministerial Level. National Crisis is established by the following criteria:

- a. The crisis is on national importance;
- b. Cessation of local government's functions;
- c. Need of integrated and comprehensive treatment involving various stakeholders/ across ministries and institutions; and/or
- d. National Crisis of other criteria as stipulated in law and legislation.

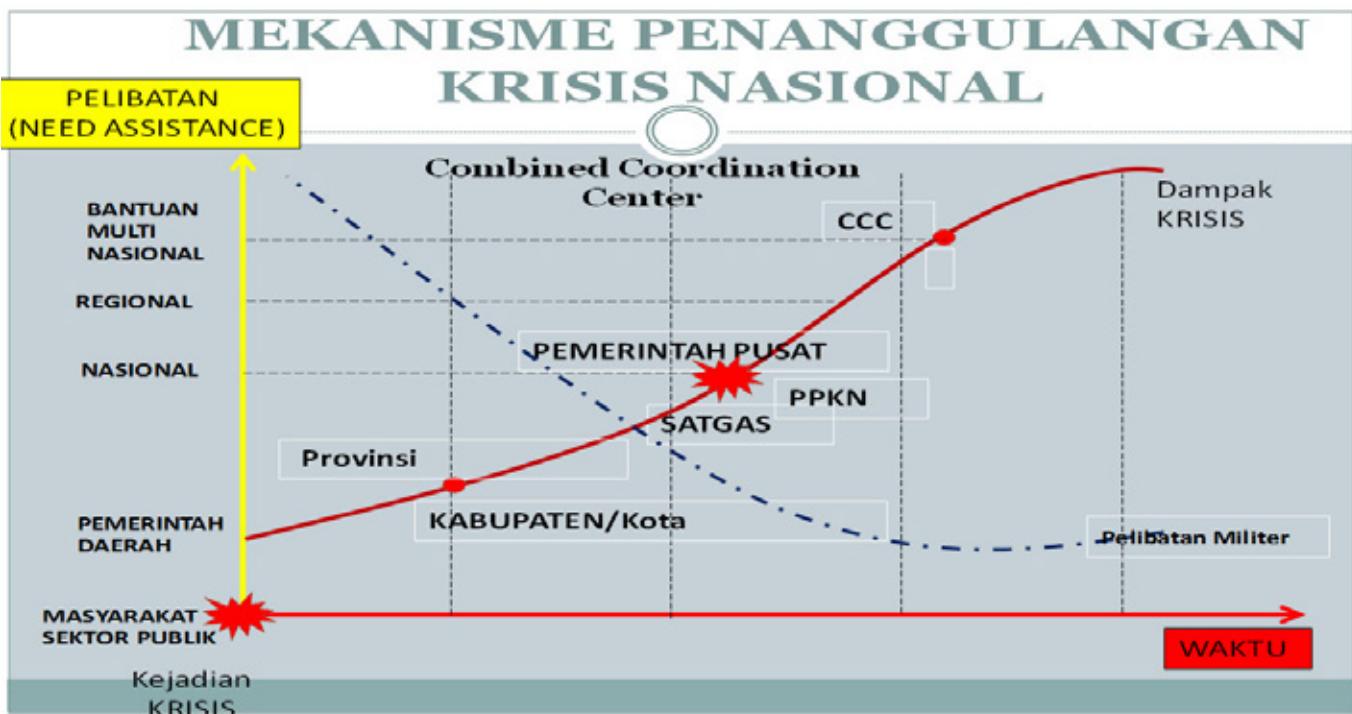
The management mechanism is as follow:

NCC OPERATIONAL CONCEPT

Implementation of NCC Operational as policy implementation is derived from information mechanism of Ministry/Institution crisis centers, local government and other institutions in the form of reporting. This information flow is managed in stages and continually to be able to get a decision at the right level. Two main processes are significant: First, if the input information is based on Crisis Escalation based on intelligence information, national/international media information, Information Crisis center (Ministry/Institution and Local Government), or other information, it will be linear via Minister Meeting and crisis establishment mechanism by the President in crisis handling in order to specify the main element and supporting elements through formulation of Presidential Instruction.

If the input information is based on Crisis Escalation of intelligent information, national/international Media, Information Crisis center (Ministry/Institution and Local Government), or other information, it will be Non-Linear Process, and the President can directly give orders (President's Direct Order) to Ministry/Institution or Ministry/Institution can form Working Unit of emergency situation. It will then controlled and managed by NCC until it can be fully under control and managed. It can be seen in the picture below.

FLOW OF CRISIS INFORMATION

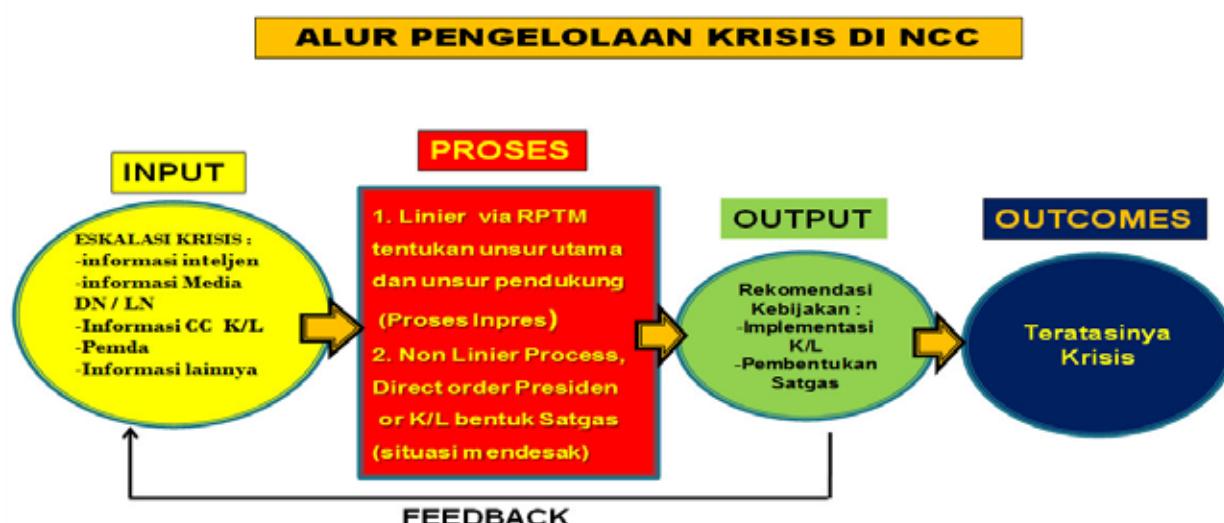


MANAGEMENT AT NCC

Output of NCC under normal circumstances is in the form of reports, that consists of: first, Brief Information Reports; second, Daily, Weekly, Monthly, Quarterly and Annual Reports; and third, Special Reports/Special Memo. Brief Information Reports is a quick and brief report in unwritten or written format; it can be done via Short Message System (SMS) or other means of information Technology. At least these reports consist of who are the actors and what is happening, where and when it is happened and how it can be occurred. This report is made by NCC Officer to be reported at first opportunity,

after a standout event or attention-need crisis and addressed to Head and Secretary of NCC.

Weekly, Monthly, Quarterly, and Annual Reports are prepared by NCC Secretariat to be reported to Coordinating Minister for Politics, Legal and Security Affairs as the Head of NCC. Special Report/Special Memo is a complete and comprehensive report analysis process conducted by analysis team or with Secretary of NCC accompanied by visualization and mapping of an incident or crisis, and also gives conclusions, suggestions and recommendations to be reported to Coordinating Minister for Politics, Legal and Security Affairs as the Head



of NCC.

In order to support tasks and functions, as well as streamline coordination efforts and handling synergy of multidimensional crisis on a national scale, NCC can recommend relevant ministries/institutions to form a task force. This task force is formed to accelerate handling multidimensional crisis of national scale that relevant with its tasks, as well as to optimize multidimensional crisis management on a national scale, NCC may involve community participation for rapid, accurate, integrated, and effective actions. Mechanism of NCC actions can be seen in the picture below.

QUO VADIS NCC FORMATION

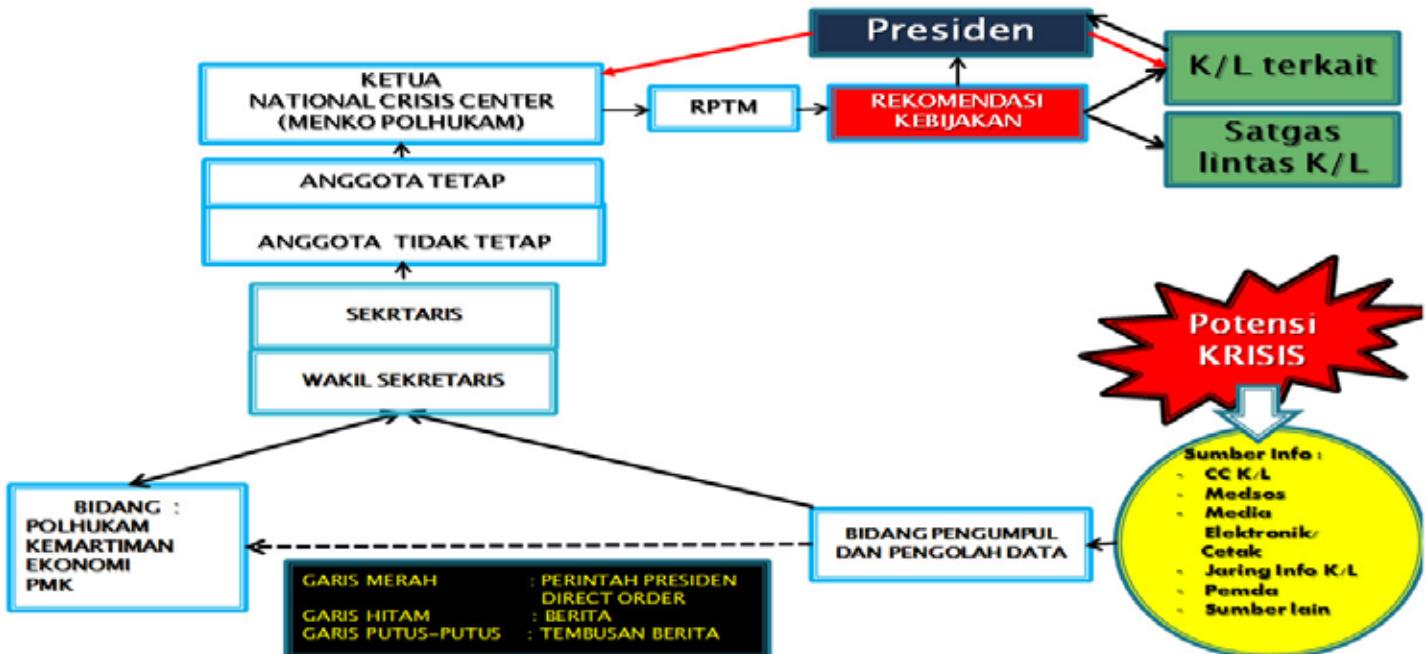
Three Main NCC Framework is NCC as National Council/Agency in formulation of national policy, Operation office room, and information system. If it is formed in Coordinating Ministry of Politics, Legal and Security Affairs,

Kerangka Utama PPKN/NCC

KERANGKA UTAMA NATION & OPSI PEMBEMBAN



PENYELENGGARAAN OPERASIONAL NCC/PPKN



NATIONAL CRISIS CENTER FORMATION



it will bring consequences in organizational, human resources, infrastructure/facilities, Budget aspects, as well as NCC standards will be in par with similar institution in other countries. Following up establishment of NCC in Coordinating Ministry of Politics, Legal and Security Affairs, NCC is formed in the absence of criteria such as effective, no specific additional budget, using existing facilities and its operation was started in June 2016. As embryo, its existence in Coordinating Ministry of Politics, Legal and Security Affairs is below standard since it has not yet meet NCC requirements for national crisis monitoring center. It is better if NCC establishment in Coordinating Ministry of Politics, Legal and Security Affairs should be merged with National Resilience Council whose facilities and infrastructures are within the office of Coordinating Ministry of Politics, Legal and Security Affairs.

CONCLUSION

In reality, NCC - in reference to development interest - is urgent, and should be realized for just and prosperous society has to be supported by national secure condition. Therefore, taking into account the existence of multidimensional national crisis, the formation of NCC can be summarized as follows:

- Philosophical Concept of NCC Formation as national policy formulation in collegial basis between Ministries/ Institutions and general public as the basis of national crisis management in national policy formulation forum/ council.
- Formulation of NCC Concept is based on operational aspects as policy implementation that derived on information mechanism of ministries/ institutions crisis center, local governments and other institutions in the form of reporting. The information flow is managed in structured stages and continuously to be able to get a decision on the right level; while information input process on crisis escalation is based on intelligent information, national/international media, Information Crisis Center (Ministries/ Institutions and Local Governments) or other information will be Linear via Ministers Meeting and the direct orders is straightly come from the President.
- Reconstructing NCC as a Formation Realization of NCC is based on juridical aspects such as the Presidential Decree, formation of NCC organization, Human Resources Management, Facility and Infrastructure Development, as well as Budget fulfillment.***



UNIQUE TRADITIONS AND THEIR PHILOSOPHY IN CELEBRATING INDONESIAN INDEPENDENCE DAY

By
Editorial Team

It has been a tradition in Indonesia to commemorate independence day with a variety of entertaining contest that bring up fun and joy to the crowd. Every contest has its own characteristic and trigger the spectators to laugh. There are number of contest such as palm tree climbing, sack contest, cracker eating, tug of war, pillow fighting and many others.

Actually, the contest tradition in commemorating the independence day has been established since 1950s particularly at the fifth commemoration. The community itself established the festivity to recall the struggling era fighting for independence. The enthusiastic people then enlived it with variety of entertaining activities. It is said that even Indonesia's first



president, Soekarno, was one of the most enthusiastic and energetic in supporting those kind of contests. Subsequently, those activities have been spreading throughout the country. Basically, the contests have their own philosophical meaning.

FLAG RAISING CEREMONIES

Though 17th August is a public holiday, it has been a tradition for governmental offices and private office as well to hold a flag raising ceremony. At the ceremony, the text of proclamation will be read out and the Red and White flag will be raised by the Paskibraka (the flag raising team). The 2016 ceremony in Merdeka Palace was lead by President Joko Widodo as leader or inspector of the ceremony.



This event is also broadcast live on national television channels. In the afternoon it has also ceremony to lower the flag.

The celebration of 71st Independence Day is slight different. For the first time, President Joko Widodo decorated the ceremony by the cultural parade. Indonesia first red and white flag was carried out by horse drawn carriage from then National Monument to the State Palace. The flag was given to President Joko Widodo and then given to Flag raising team. It is the President Joko Widodo's idea to bring such parade and performance. The President wants to bring something different that can be seen by Indonesian people.

PALM TREE CLIMBING

Palm tree climbing is a contest to get the prizes hanging at the top of the tree. Whoever makes it to the top wins the prize but it is difficult since the tree greased by oil. So how is the history of this palm tree climbing contest. A variety of sources describe it was adopted from contest in colonial era. At that time, the contest brought fun to crowd. This



simomot.com

was a performance to enliven the wedding ceremony or others. The competitors were usually indigenous people. They compete to win the prizes which were luxurious for them. Mostly the prizes were wheat, cheese, sugar and clothes. Today contest has been an icon to celebrate Indonesia independence day. Team work is the key to win.

SACK CONTEST

Sack Contest is a kind of competition where the participants get into the sack and run. They must run to a certain distance. Whoever makes it to the finish line without being out of the sack wins the prizes. It is said that this sack contest has the philosophy to remind Indonesian people of the difficulties during Japanese colonial era. At the time, the most luxurious cloth owned by most Indonesian were made of goni. The sack contest has also been a must contest in celebrating independence day.

PILLOW FIGHTING

Another unique tradition in celebrating independence day is pillow fighting. This

tradition has been held by the people from time to time. It is a kind of contest to make the rival fall down by hitting him/her with a pillow. The two participants sit in a bamboo or palm tree that put across the pond or "sawah" (wet rice field). The rule is whoever succeeds to make his/her rival fall down by hitting with pillow wins. Similar to the philosophy of palm tree climbing, this is also to remind Indonesian people to always unite. How easy the colonialist did practice "*divide et impera*" way just for prize compensation. Through this kind of contest, togetherness and unity should be firmly kept. Moreover, the values of honesty, nobleness and fairness can be learned through the game.



Sumber: ft.unram.ac.id

TUG OF WAR

Tug of war is a traditional and very popular game all over the world. It is said that the tug of war is one of the oldest games in human history. In Indonesia this game is also very popular within the communities and usually been performed at a particular event. At Indonesian independence day's celebrations, this game is one of the popular games performed by the people. Actually, this game contains of two teams. Each team has similar number of participants. The team that is able to pull first the opposing team towards the center line win the contest. The game brings up the meaning of togetherness and solidarity amongst the people. The participants show their perseverance. Yet, perseverance had been performed by the nation heroes. This spirit should be kept and practiced in the life of nation and country.



CRACKER EATING

Nowadays this game normally is played by children, but in the past, the adult did. The participants eat a cracker hanging from a string with their hand tied behind their back. The participants try to eat the entire cracker. This is also the symbol of concern of the condition of Indonesian people during the colonial era. Cracker eating is symbol of food. It can be imagined the poor Indonesian lacked of food, while in contradiction the colonialist lived in luxurious condition. Though most of the people do not understand the philosophy behind, in fact this kind of game bring joy and fun to the people.

INDEPENDENCE CARNIVAL

Independence carnival is always held by the people. Besides as a kind of praise and to increase sense of unity and togetherness, it is also to show the creativity and heterogeneity of Indonesia. Therefore, the spirit of innovative and creativity is shown through this game. The message is clear: be innovative and creative.

TIRAKATAN NIGHT

Tirakatan actually means an activity to

introspect what had been done and what will be doing. The meaning of this activity is to perform meditation and prayer to Almighty God. The *tirakatan* night of independence day is held in order we are able to introspect ourselves and to think about the journey of the country. Hopefully it will bring and enhance the pride of the nation. The efforts and difficulties of founding fathers in fighting for independence should not be forgotten. Communities particularly in Central Java still conduct *tirakatan* night before independence day. They usually gather in a certain place to pray together commenced by praying for independence hero and then for prosperity and safety of the nation and country. Hereafter they dine together and keep awakening or *melekan* in local language.

It is expected the festive celebration of independence throughout the country is not just the physical celebration itself, but instead it is a momentum for Indonesian People to increase the commitment to do their best for the beloved country, Indonesia.***

Long live Indonesia.

**DEFENSE FACILITIES
AGENCY OF MOD**



**CHIEF OF THE DEFENSE FACILITIES
AGENCY
Rear Admiral TNI Ir. Leonardi, M.Sc.**

POSITION, TASKS, AND FUNCTIONS

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

DEFENSE FACILITIES AGENCY (BARANAHAN).

Defense Facilities Agency (*Baranahan*) is the supporting element of tasks and functions of the Ministry. It is under and is responsible to the Minister. It is led by the Chief of the Defense Facilities Agency (*Ka Baranahan*) whose task is to manage defense infrastructure.

In conducting its tasks, *Baranahan* has following functions:

1. Preparation of technical policies, plans and programs in defense facilities management;
2. Implementation of tasks in defense facilities management including procurement of defense construction and infrastructure services, worthiness certification, material codification, and asset management/state owned property in defense sector;
3. Monitoring, evaluation and reporting of task implementation in defense facilitiesmanagement; and
4. Administration of *Baranahan*.

Structurally, *Baranahan* consists of a Secretariat and five Centers:

1. SECRETARIAT OF THE DEFENSE FACILITIES AGENCY (SET BARANAHAN).

Secretariat of Defense Facilities Agency is assisting element of the Chief of the Defense Facilities Agency. It is led by the Secretary of Defense Facilities Agency (*Ses Baranahan*) whose task is to provide technical and administration services of the Agency.

In conducting its tasks, *Set Baranahan* has following functions:

- a. Planning, implementation, control, accounting, financial administration management, budget calculation and assessment, evaluation and Programme and budget reporting; as well as performance accountability reporting of the Agency;
- b. Personnel development, financial administration, materials, administration and internal affairs as well as institutional arrangement and management of the Agency;
- c. Management of data and information as well as documentation and library of the Agency;
- d. Coordination of national and international forums in defense facilities; and
- e. Staff coordination and supervision.



Set Baranahan consists of:

- a. Programme and Reporting Section,
- b. Data and Information Section,
- c. Forum Section,
- d. General Affairs Section,
- e. Functional Job Section.

2. PROCUREMENT CENTER (PUS ADA).

Procurement Center (*Pus Ada*) is executing element of tasks and functions of the Defense Infrastructure Agency. It is led by the Chief of Procurement Center (*Kapusada*) whose task is to implement the procurement of Main Weaponry System, supporting tools and equipment and maintenance services, medical equipment from local and foreign suppliers including



grants, acquisition, and distribution within the framework of defense strength development.

In conducting its tasks, *Pus Ada* has following functions:

a. Formulation and implementation of technical policy in procurement of defense facilities;

- b. Administration in the procurement of defense products and services;
- c. Procurement of Main Equipment of Weaponry System, supporting tools and equipment and maintenance services, medical equipment from local and foreign suppliers including grants towards Army, Navy and Air force Sectors;
- d. Monitoring and controlling the procurement of defense products and services;
- e. Technical guiding and supervision in the procurement of defense products and services;
- f. Transfer of procurement of defense facilities and grants to the users;
- g. Programme and budget planning, as well as evaluation and reporting; and
- h. Management of administration and internal affairs of the Center.

Pus Ada consists of:

- a. Army Service Section,
- b. Navy Service Section,
- c. Air force Service Section,
- d. Administration Sub-section,
- e. Functional Job Section.

3. CONSTRUCTION CENTER (PUSKON).

Construction Center (*Puskon*) is executing element of tasks and functions of the Defense Facilities Agency. It is led by Chief Construction Center (*Ka Puskon*) whose task is to implement construction service procurement of defense facilities.



In conducting its tasks, Puskon has following functions:

- a. Formulation and implementation of technical policy in construction service of defense facilities;
- b. Programme and budget planning and preparation and implementation of technical policy in construction service of defense facilities;
- c. Administration implementation of procurement of construction service of defense facilities;
- d. Implementation of control and monitoring of construction and service of defense facilities as well as technical supervision;
- e. Handing over construction works to the users;

f. Programme and budget planning and preparation as well as evaluation and reporting of construction works; and

g. Management of administration and internal affairs of the Center.

Puskon consists of:

- a. Construction Planning Sector,
- b. Construction Procurement Administration Sector,
- c. Construction Control and Monitoring Sector,
- d. Administration Sub-section,
- e. Functional Job Section.

4. WORTHINESS CENTER (PUSLAIK).

Worthiness Center (*Puslaik*) is executing element of tasks and functions of the Defense Facilities Agency of the Ministry of Defense. It is led by the Chief of Worthiness Center (*Kapuslaik*) whose task is to formulate, to prepare, to implement and to give evaluation of technical policy in certification of types and worthiness of army, navy and air force products/ means of defense, quality assurance system certification/quality management of production facilities and maintenance/ repair facilities, as well as personnel qualification certification for military feasibility organizers.

In conducting its tasks, *Puslaik* has following functions:

- a. Formulation, preparation, and implementation of technical policies in certification (design engineering) and worthiness of defense facilities for army, navy and air force sectors;
- b. Evaluation in application of standards, rules, guidelines, criteria and procedures for type (design engineering) certification and worthiness of defense facilities for army, navy and air force sectors;
- c. Formulation, preparation, and implementation of technical policies in certification of quality assurance system/quality management of production facilities and maintenance/ repair facilities of defense facilities for army, navy and air force sectors;
- d. Evaluation in standardization, standards, rules, guidelines, criteria, and procedures of certification of quality assurance system/quality management of production facilities and maintenance/ repair facilities of defense facilities for army, navy and air force sectors;

- e. Preparation of procedures for implementation of type and worthiness certification of defense facilities for army, navy and air force sectors;
- f. Implementation of personnel qualification certification for military worthiness study of army, navy and air force sectors;
- g. Guidance, technical supervision in certification in worthiness of defense facilities, application of standards, rules, guidelines, criteria and procedures, and certification of quality assurance system/quality management of maintenance/repair facilities in army, navy and air force sectors;
- h. Guidance, technical supervision in certification in type of feasibility of defense means, application of standards, rules, guidelines, criteria and procedures, and certification of quality assurance system/quality management of maintenance/repair facility in Production Facilities;
- i. Programme and budget planning, preparation as well as evaluation and reporting; and
- j. Management of administration and internal affairs of the Center.

Puslaik consists of:

- a. Land-Worthiness Sector,
- b. Sea-Worthiness Sector,
- c. Air-Worthiness Sector,
- d. Administration Sub-section,
- e. Functional Job Section.

5. CODIFICATION CENTER (PUSKOD).

Codification Center (*Puskod*) is executing element of tasks and functions of the Defense facilities Agency of the Ministry of Defense. It is led by the Chief Codification Center (*Kapuskod*) whose task is to implement development and codification administration of defense materials.

In conducting its tasks, *Puskod* has following functions:

- a. Preparation of materials for formulation and implementation of technical policy in defense material codification;
- b. Planning, implementation, and evaluation of development and administration of defense material codification;
- c. Operational implementation of defense material codification;
- d. Formulation and implementation of technical support and development of functional cataloguers;
- e. Coordination of cataloging and defense materials codification in bilateral and multilateral basis;
- f. Guidance and technical supervision in defense material codification;
- g. Preparation of codification and information systems development;
- h. Preparation of Programme and budget planning, as well as evaluation and reporting of the Center, and
- i. Management of administration and internal affairs of the Center.

Puskod consists of:

- a. Codification Administration Planning

Section,

- b. Codification Operational Section,
- c. Codification Technical Support Section,
- d. Administration Sub-section,
- e. Functional Job Section.

6. STATE OWNED PROPERTIES CENTER (PUS BMN).

State Owned Properties Center (*Pus BMN*) is executing element of tasks and functions of *Baranahan*. It is led by the Chief of Center of State Owned Properties (*Kapus BMN*) whose tasks are to prepare and to implement the use, utilization, elimination, transfer, development and control as well as security and maintenance of state owned objects within the Ministry of Defense and *TNI*.

In conducting its tasks, *Pus BMN* has following functions:

- a. Technical policy formulation of implementation of use, utilization, elimination, development and control of state owned objects within the Ministry of Defense and *TNI*;
- b. Implementation of security and maintenance administration of state owned objects within the Ministry of Defense and *TNI*;
- c. Implementation of procurement and land certification within the Ministry of Defense and *TNI*;
- d. Implementation of technical guidance of use, utilization, elimination, transfer, administration, development, control, security and maintenance of state owned objects within the Ministry of Defense and *TNI*;



- e. Inventory, assessment and documentation of state owned objects within the Ministry of Defense and TNI;
- f. Implementation of analysis and reporting of use, utilization, elimination, transfer, administration, development, control, security and maintenance of state owned objects within the Ministry of Defense and TNI;
- g. Programme and budget preparation as well as evaluation and reporting; and
- h. Management of administration and internal affairs of the Center.

Pus BMN consists of:

- a. State Owned Properties I Section,
- b. State Owned Properties II Section,
- c. State Owned Properties III Section,
- d. Administration Sub-section,
- e. Functional Job Section.***



Ministry of Defence
of The Republic of Indonesia

INDO DEFENCE 2016 EXPO & FORUM

Incorporating with:



INDONESIA'S NO.1 OFFICIAL TRI-SERVICE DEFENCE, AEROSPACE, HELICOPTER AND MARINE EVENT

**"Bolstering Defence Industry Cooperation:
Achieving a Global Maritime Fulcrum and Secure World"**

Contact Us for more information

Ms. Erike Brigitha Malonda

Project Manager

M : +62 815 9254 215

E-mail : erike@napindo.com / erike.napindo@gmail.com

Ms. Lisa Rusli

Project Manager

M : +62 815 1822 716

E-mail : yulisa@napindo.com / yulisa.napindo@gmail.com

Book
Your Prime
Location
Now!

2 - 5 NOVEMBER 2016

JIEXPO KEMAYORAN
JAKARTA - INDONESIA

- Only for Trade and Professional Visitors. Visitors under 18 years are prohibited from entering. - Visitors are requested to be decently attired.



Exhibition Hours:

10.00 - 17.00 (2 - 4 Nov 2016) - For Trade / Professional Visitors
10.00 - 16.30 (5 Nov 2016) - Open for Public with Entrance

Supported by



Official Publications and Show Daily



Official Online Publication



Official Hotel



Supporting Publications



Organised by

Showing The Way!



PT Napindo Media Ashatama

Jl. Kelapa Sawit XIV Blok M1 No.10, Kompleks Billy & Moon, Pondok Kelapa, Jakarta 13450, Indonesia
Tel: +62-21 8650962, 8644756/85, Fax: +62-21 8650963, E-mail: info@indodefence.com

indodefence.com | indoaerospace.com | indohelicopter.com | indomarine.co

Indo Defence Expo & Forum, Indo Marine Expo & Forum, Indo Aerospace & Helicopter Expo & Forum

@IndoDefence, @IndoMarineExpo, @IndoAerospace